



● TABLOID

REFERENSI PEMILU 2024 ●

nfo indonesia

MINGGU III SEPTEMBER 2023

Harga @Rp 20.000,-

CALON PRESIDEN MULAI MAINKAN POLITIK IDENTITAS



**PILPRES
DIPAKSAKAN
SATU PUTARAN**

**KADER DAERAH
MENANGKAN
PRABOWO**

**CARI SIMPATI
LEWAT KONFLIK
REMPANG**

**CAGUB ACEH
TAK PUNYA
GAGASAN**

**POLWAN
HARUS JADI
PENDINGIN PEMILU**



Road to
Election
2024

“Jadi jangan semua hal dikaitkan dengan politik identitas. Itu mencari dukungan dari kiai yang di mana kiainya, tokoh agamanya, tokoh masyarakatnya banyak pengikutnya. Di situlah sebenarnya kepentingan dari para capres, termasuk Prabowo”

Ujang Komarudin



Identitas

Beberapa tahun lalu, telinga dan mata kita cukup akrab mendengar serta membaca istilah Cebong dan Kampret sebagai bentuk pembeda dukungan di Pemilu 2019. Ada konotasi negatif yang disematkan terhadap identitas pendukung Cebong dan Kampret oleh para buzzer bayaran.

Di Pemilu 2024, sebutan itu mulai sirna. Tidak ada lagi Cebong dan Kampret. Bahkan, identitas itu sekarang berubah arah menjadi positif. Perubahan ini terjadi karena situasi politik yang memaksa untuk menciptakan identitas sesungguhnya.

Kini, sebutan pembeda identitas sudah berubah dan terkesan sangat halus yakni nasionalis dan agamis.

Secara karakter Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto dinilai menyandang karakter nasionalis karena didukung partai-partai yang beraliran tersebut.

Sementara, Anies Baswedan dianggap calon yang berkarakter agamis nasionalis. Hadirnya Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) makin menguatkan identitas itu, ditambah unsur nasionalis dari Partai Nasdem.

Banyak pengamat menilai, identitas baru ini jelas menguntungkan Anies Baswedan. Sementara, Prabowo dan Ganjar harus berebut simpati dari basis nasionalis. Kondisi ini tentu sudah disadari betul dari tim dua kandidat.

Kini identitas sebagai partai yang juga berbasis agama juga ramai-ramai dilakukan pengu-sung nasionalis. Politik identitas yang dulu sengaja dibuat negatif kini diubah kembali ke bentuk aslinya.

Kajian politik identitas ini menjadi salah satu sajian utama Tabloid Indonesia edisi III September.

Selain soal politik identitas, kami juga membahas sikap mahasiswa yang ternyata tidak mempercayai seratus persen kemampuan para bakal calon presiden ini mampu membawa rakyat Indonesia maju dan sejahtera.

Mereka menilai para calon pemimpin bangsa yang tersaji sekarang hanya mengutamakan popularitas dan elektabilitas tanpa mampu menjelaskan gagasan apa yang akan mereka lakukan bila kelak jadi pemimpin bangsa.

Di sisi lain, kami juga mengapresiasi beberapa calon anggota legislatif yang kembali maju di Pemilu 2024 meski mereka gagal di Pemilu 2019. Secara materi mungkin sudah banyak dana yang mereka keluarkan, namun hasrat ingin mengabdikan kepada masyarakat menghapuskan kera-guan mereka dan akhirnya memilih maju di Pileg 2024.

Selain itu kami juga mengangkat suara dari kaum marjinal dan komunitas yang selama ini selalu terabaikan. Kehadiran mereka hanya diingat saat menjelang Pemilu, selebihnya mereka seperti tidak mendapat perhatian.

Ternyata ada banyak keinginan dan cita-cita yang ingin mereka sampaikan terhadap para pemimpin Indonesia nanti. Semoga semua keinginan mereka tersebut terkabulkan.

Ada banyak sajian menarik yang kami informasikan di Info Indonesia edisi kali ini. Selamat membaca!!!



infoindonesia

INFOINDONESIA.ID adalah media massa cetak di bawah payung PT. DUA SATU PRO
Sertifikat Dewan Pers
Nomor 969/DP-Verifikasi/K/III/2022

PENDIRI/ DIREKTUR : Usman Rizal

PEMIMPIN PERUSAHAAN: Adam Aulia Manzan Khan PEMIMPIN REDAKSI: Rusdiyono WAKIL PIMPINAN REDAKSI: Rahmad Romli

REDAKTUR PELAKSANA: Irmayani REDAKTUR: Rio Taufiq Adam, Fonda Lapod, Rusdy Setiawan Putra, Irmayani, Rusdiyono, Nina

Erlina REPORTER: Nefri, Indra Hadi, Pahmi Ramadhan, Moehamad Moeslim, Sadam M, Hardi Aar, Reno, Aldi Rinaldi, M. Iqbal, Andyanto,

M. Yadhi, Muhammad Fiqri, Muhammad Khaidir EDITOR & GRAFIS: Al Amin, Achilles TATA LETAK: Sujatmiko MEDIA SOSIAL: Haidir Ali

KEUANGAN : Dra Hj Nurkhamida SEKRETARIS REDAKSI: Nur Aisah PENGEMBANGAN BISNIS: M. Iqbal, Zul Fahmi ADMINISTRASI:

Ega Tri Gustina DISTRIBUSI: Abdul Muchtar

HARGA IKLAN: 1 Halaman ukuran 290 mm x 420 mm Rp.25.000.000,-include PPN 11 %.

1/2 Halaman ukuran 145 mm x 210 mm Rp. 12.500.000,-

BANK ACCOUNT: *A/N : PT. DUA SATU PRO, BCA: No.Rek: 5530682121 KCP Otista Jakarta Timur ALAMAT REDAKSI/IKLAN/

PEMASARAN: Jl. Raya Kalibata No.8, Rawajati, Kec. Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12750 TELP 021-

791 96781 FAX 021-791 96786 PALEMBANG Jalan Puncak Sekuning Lorong Sahabat No 2 Kelurahan Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat I

Palembang 30126 TELP : 0711-7442344



“Jadi, Nasdem dan Surya Paloh itu kan dari kelompok partai yang berhaluan nasionalis, bukan partai Islam. Semestinya dalam menyusun strategi kampanye politiknya mereka tak lagi menggunakan politik identitas untuk instrumen kemenangan”

Karyono Wibowo

DUET AMIN MAINKAN POLITIK IDENTITAS

Duet Anies Rasyid Baswedan dan Muhaimin Iskandar dalam beberapa pekan ini ramai disorot publik.

Duet Amin itu sempat memunculkan keriuhan karena meninggalkan Partai Demokrat dan akhirnya memilih Cak Imin yang merupakan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa sebagai cawapres Anies Baswedan.

Usai konflik tersebut, duet Amin kembali dihembuskan isu baru menjelang pendaftaran capres-cawapres di Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Baru-baru ini, sejumlah pihak turut menyoroti kemungkinan bakal munculnya kembali manuver politik identitas dalam Pemilu 2024. Isu politik identitas itu pun kini menyeret nama Anies-Cak Imin yang telah resmi dideklarasikan oleh Koalisi Perubahan. Sebab, berdasarkan catatan, Anies ditengarai sebagai sosok yang berhasil menggunakan strategi politik identitas dalam memenangkan Pilkada DKI Jakarta 2017.

Saat itu, Anies yang didukung oleh kelompok agamis sebagai konstituennya berhasil menumbangkan lawan politiknya dan menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022.

Adapun keberhasilan Anies menuju DKI 1 itu ditenggarai tidak terlepas juga dari kekuatan kelompok basis agama yang bermanuver untuk bersaing dengan lawan politik melalui framing-framing citra berbasis kekuatan massa.

Menelisik situasi hari ini, apakah duet Amin yang telah resmi diusung Koalisi Perubahan terdiri Partai Nasdem, PKB, dan PKS nantinya dapat menghindari manuver politik identitas di kontestasi Pemilu 2024? Sebab, kehadiran PKB dan Nasdem dalam koalisi tersebut juga digadang-gadang sebagai representasi perpaduan basis nasionalis dan agamis yang mampu menolak adanya manuver politik identitas menjelang Pemilu 2024.

Berkaitan dengan hal itu, Pengamat Politik Indonesia Public Institute (IPI), Karyono Wibowo, menilai, bergabungnya duet Anies-Cak Imin semestinya dapat menghindari polarisasi politik identitas di Pilpres 2024.

Karyono mengatakan, hal itu lantaran kehadiran Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, yang dinilai sebagai sosok nasionalis tulen dapat menjegal adanya upaya politisasi identitas pada pesta demokrasi mendatang.

Selain itu, Karyono menuturkan, Cak Imin yang dikenal sebagai representasi tokoh nasionalis dan agamis tulen juga dinilai mampu menghindari polarisasi politik identitas di Pemilu 2024. Sebab, kedua sosok tersebut sejauh ini dinilai memiliki catatan pengalaman sebagai representasi tokoh nasionalis-agamis yang dapat meredam polarisasi politik identitas di Pemilu 2024.

“Kalau menurut saya pasangan Anies

Muhaimin ya itu kan memang figurnya dia kan representasi dari kelompok Islam ya. Cak Imin ini dari Nahdlatul Ulama (NU),” ungkap Karyono, Jumat, 15 September 2023.

“Jadi Nasdem dan Surya Paloh itu kan dari kelompok partai yang berhaluan nasionalis, bukan partai Islam. Semestinya dalam menyusun strategi kampanye politiknya mereka tak lagi menggunakan politik identitas untuk instrumen kemenangan,” sambung Karyono.

Sebelumnya, Surya Paloh dalam agenda deklarasi ‘Amin’ yang digelar di Surabaya juga telah menegaskan bahwa koalisi perubahan dengan tegas menolak adanya politik identitas dalam Pemilu 2024.

Surya Paloh menegaskan duet Amin dalam Pilpres 2024 merupakan pasangan nasionalis dan religius yang bakal meninggalkan polarisasi dan manuver politik identitas.

“Tidak ada politik identitas, tidak ada lagi juga cebong dan kampret, itu kata Surya Paloh ya dalam deklarasi di Surabaya, nah sehingga kalau menurut saya itu akan dicatat oleh publik,” tutur Karyono.

Karyono melihat, sosok Surya Paloh dan Cak Imin dalam Koalisi Perubahan bakal jadi tembok penghalang untuk pihak-pihak pendukung Anies yang mencoba melakukan manuver politik dengan strategi membentuk politik identitas di masyarakat.

Hal itu lantaran Cak Imin dikenal berasal dari kalangan Nahdliyin yang cukup didukung kiai dan ulama NU tidak akan menggunakan agama untuk kepentingan politik, apalagi dalam Pemilu 2024.

“Intinya gini aja ya jangan sampai menggunakan politik identitas, karena itu pasti akan benturan dengan Surya Paloh dan Muhaimin. Karena Cak Imin itu representasi dari Islam wasatiyah dari Nahdliyin dan ulama yang sangat keras untuk menentang agama dijadikan politisasi atau yang menentang politisasi SARA,” ujar Karyono.

Kendati demikian, Karyono

memprediksi bahwa politik identitas, SARA dan agama akan sulit untuk dihilangkan dalam Pemilu 2024. Sebab dalam politik ketiga hal itu merupakan instrumen yang digunakan menjatuhkan lawan dalam bersaing merebut suara dan simpati masyarakat.

Di sisi lain, Karyono menyebut, dalam Pemilu 2024 kemungkinan juga akan diwarnai kampanye hitam, kampanye negatif yang bakal menyerang khususnya pada ruang media sosial.

“Nah, makanya kemungkinan Pemilu 2024 akan diwarnai politik identitas, juga akan diwarnai dengan black atau negative campaign. Itu ya memang kemungkinan masih akan terjadi karena ini kan pertarungan politik kan,” ujar Karyono.

“Karena dalam pertarungan politik salah satu instrumennya adalah bagaimana membangun isu untuk mendowngrade untuk menyerang dan termasuk memframing pernyataan dari lawan politik,” sambung Karyono.

Oleh karena itu, Karyono menegaskan, masyarakat sejatinya harus lebih berhati-hari dalam mencermati berbagai isu yang muncul, khususnya tentang isu politik.

“Politisasi agama juga kemungkinan masih. Oleh karena itu publik harus lebih bijak dan hati-hati dalam mencermati berbagai isu yang muncul. Kita masyarakat harus lebih bijak dalam berpendapat,” ujar Karyono.

Karyono menegaskan, baik Anies, Cak Imin dan Surya Paloh sejatinya harus konsekuen dan konsisten untuk tidak lagi menggunakan politik identitas ataupun kampanye hitam demi memenangkan Pilpres 2024.

“Jadi dia harus istiqomah. Makanya tadi saya bilang kalau Surya Paloh dan Muhaimin konsisten menolak politik identitas, maka ketika ada koleganya di dalam koalisi yang mengusulkan atau melakukan upaya politik identitas, maka mereka yang harus juga menentang itu,” ucap Karyono.

“Karena residunya sangat besar, dampaknya juga sangat besar, residunya itu kan masih sangat terasa saat ini. Itu bisa merusak kohesi sosial, merusak relasi sosial di mana Indonesia itu beragam, maka kalau itu terjadi bisa merusak persatuan,” sambungnya. Pengamat politik dari Citra Institute, Efriza, menilai, isu penolakan soal politik identitas Anies-Cak Imin telah menunjukkan bahwa sudah terbangun kesadaran kandidat capres untuk lebih mengedepankan nilai-nilai persatuan dari pada perpecahan.

Efriza menilai, bentuk pernyataan duet Anies-Cak Imin beserta koalisi

yang dengan tegas menolak politik identitas dapat membangun kesadaran bersama kepada calon lain untuk lebih mengedepankan program visi misi dalam bersaing di Pemilu 2024.

Efriza menambahkan, masyarakat memang sebaiknya diarahkan mengenai program visi-misi daripada dibenturkan dengan manuver politik identitas. Hal itu agar masyarakat dapat mengetahui tawaran apa yang disampaikan oleh para kandidat pada Pemilu 2024.

“Jadi dari sanalah masyarakat menilai tawaran yang memang bisa diimplementasikan. Anies-Imin malah yang ditunggu oleh masyarakat adalah mengenai tawaran perubahan yang dijadikan nama Koalisi Perubahan,” ungkap Efriza.

Efriza menilai, jika duet Amin menggunakan politik identitas maka jelas akan merugikan konstituennya lantaran basis NU sangat menentang perpecahan dan lebih mengedepankan politik persatuan.

“Isu identitas jika digunakan merugikan bagi PKB. Jelas-jelas warga Nahdliyin amat mengedepankan persatuan. Maka memungkinkan warga NU akan memberikan respons negatif kepada pasangan calon,” tutur Efriza.

Efriza menuturkan, pasangan Amin harus membuktikan kepada publik menolak politik identitas agar nanti para pendukung dan konstituennya tetap konsisten mendorong kedua tokoh di Pilpres 2024.

“Jadi pernyataan pasangan itu sangat perlu untuk dibuktikan dengan perilaku dan cara berkomunikasi. Sehingga ke depannya, para pendukung akan mengikuti arahan pasangan ini yang menolak isu politik identitas,” ujar Efriza.

“Namun dalam hal ini pertanyaan yang sulit yaitu mengembalikan kesadaran pemilihnya, untuk menjauhkan dari persoalan identitas. Karena isu politik identitas selalu dilekatkan kepada Anies, dan isu ini juga dianggap yang menyebabkan kemenangan Anies-Sandi di Pilkada 2017,” pungkasnya. ●RDO



“Dalam politik Indonesia, tokoh informal seperti ulama memiliki peran yang sangat besar dalam memobilisasi suara, khususnya dalam Pemilu”

Hasyibulloh Mulyawan



PRABOWO MENCARI DUKUNGAN ULAMA

Jelang pendaftaran pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, para kandidat yang sudah ditetapkan oleh partai politik mulai melakukan safari politik.

Selain bertemu Masyarakat, para capres juga safari bertemu dengan tokoh-tokoh agama atau ulama. Bahkan, ada beberapa organisasi keagamaan yang menyatakan dukungannya kepada capres tertentu.

Misalnya, dukungan dari ribuan kiai dan santri Nahdlatul Ulama (NU) di Jawa Timur terhadap capres Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Dukungan itu disampaikan dalam acara “Bermunajat Untuk Prabowo Sang Pemimpin Rakyat.”

“Masyarakat Jawa Timur bersama alim ulama, para kiai, ibu nyai, para santri menyatukan langkah, berniat dengan niat yang tulus, istiqomah berjuang, berikhtiar, berjihad memenangkan Prabowo untuk menjadi Presiden 2024-2029 melalui Pilpres 2024,” kata Koordinator Jawa Timur Bermunajat, KH Ma'ruf Mubarak, dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Selasa, 12 September 2023.

Dia mengatakan, dukungan kepada Prabowo Subianto bukan tanpa alasan. Mereka percaya bahwa Menteri Pertahanan itu bisa membawa Indonesia menjadi negara maju.

“Kita semua me-mu-

tuskan untuk memberikan dukungan kepada Bapak Prabowo Subianto karena berlandaskan ingin melihat Indonesia menjadi lebih maju dan lebih berkah dari saat ini,” jelas Ma'ruf Mubarak.

Acara Jawa Timur Bermunajat Untuk Prabowo Sang Pemimpin Rakyat dihadiri Pimpinan Pondok Pesantren Salfiyah An-Nur Ridlolloh, KH Moh Khasan Rifai; Pimpinan Ponpes Ndresmo Surabaya, KH Achamad Nasrochuddin; dan Pimpinan Ponpes Darussalam Candu, KH Akhsin Kamil Ibrahim.



Selanjutnya, Pimpinan Ponpes Minatur Rohman, KH Khozin; Pimpinan Ponpes Al Istiqomah, KH Faisol; Pimpinan Ponpes Abu Dzarrin, KH MN Ulum; Pimpinan Ponpes Darussalam Tegal Rejo, KH Arjun Khan; Pimpinan Ponpes Miftahul Ulum 02, KH Fathussurur; Pimpinan Ponpes Al Fallah, KH Imam Nawawi; dan Pimpinan Ponpes Alhasyimi, KH taufiq Jamhur.

Direktur Eksekutif Ethical Politics, Hasyibulloh Mulyawan, menilai, dukungan dari para ulama memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap suara yang akan diperoleh calon presiden yang bertarung di Pilpres 2024.

“Dalam politik Indonesia, peran tokoh informal seperti ulama memiliki peran yang sangat besar dalam memobilisasi suara, khususnya dalam Pemilu,” jelas pria yang akrab disapa Iwan kepada Info Indonesia.

Apalagi, kata Iwan, para alim ulama khususnya para kiai yang memiliki Ponpes yang notabennya para santri akan mengikuti langkah dari kiai tersebut. Sehingga, tidak heran para capres ingin mendapatkan dukungan dari para alim ulama.

“Para capres berebut dukungan mereka dan mengafirmasikan dukungan tersebut kepada masyarakat, dengan harapan mereka bisa menang dalam kontestasi,” terang Iwan.

Dia menjelaskan, dukungan para ulama atau organisasi keagamaan tidak termasuk dalam politik identitas. Sebab, masyarakat akan menilai bahwa dukungan dari kelompok keagamaan merupakan bagian dari politik identitas.

“Kalau untuk dukungan kiai sepertinya bukan masuk dalam politik

identitas,” terang Iwan.

Dia mengatakan, capres yang bertemu para alim ulama itu bertujuan untuk mendapatkan dukungan dari pemilih mayoritas di Pilpres. Apalagi, pemilih mayoritas berada di wilayah lumbung suara. Jadi, pastinya akan banyak diperebutkan.

“Lebih kepada mencari dukungan kepada mayoritas pemilih yang kebanyakan muslim dan santri di beberapa wilayah yang memiliki DPT terbesar di Indonesia dan merupakan penentu kemenangan mereka dalam Pilpres mendatang,” jelas Iwan.

Dia menyakini pertarungan di Pilpres 2024 sangat cair. Para calon akan lebih mengedepankan beradu gagasan. Selain itu, masyarakat saat ini sudah lebih cerdas dalam menyikapi fenomena politik yang terjadi di ruang publik.

“Apalagi masyarakat kita saat ini cenderung lebih cerdas dalam memilah isu yang beredar di media sosial. Sehingga, kemungkinan terjadi lagi politik identitas sepertinya sulit terjadi,” kata Iwan.

Dia mengatakan, kelompok yang keras saat Pemilu 2019 antara kelompok Islam dengan kearifan nasional dan Islam transnasional saat ini berada di koalisi yang sama untuk mendukung capres yang memiliki kecenderungan memainkan isu politik identitas.

“Namun karena mereka bersatu dan sempat bersitenggang pada saat itu, jadi sulit isu politik identitas dimainkan lagi pada Pemilu 2024 ini,” terang Iwan.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin, mengatakan arahan pilihan para ulama akan sangat mempengaruhi pilihan dari masyarakat.

“Sangat besar pengaruhnya bagi masyarakat. Kita di Indonesia masih terkenal dengan istilah teori yang masyarakat kelas bawah itu ikut pemimpin atasnya. Saya melihat bahwa pengaruhnya besar, makanya apa namanya kiai-kiai di Jawa timur, Jawa Tengah itu yang berbasis seperti NU itu pengikutnya itu nurut, manut dan taat kepada tokoh agama,” jelas Ujang kepada Info Indonesia.

Dia menyadari, safari politik yang dilakukan capres ke para ulama itu merupakan bagian dari mendapatkan dukungan. Sebab, pengaruh para ulama atau kiai itu sangat besar di masyarakat.

“Keliling-keliling ke pesantren-pesantren untuk mendapat mendudukan tokoh-tokoh agama tersebut, karena memang perannya sangat besar di masyarakat kita,” jelas Ujang.

Menurutnya, safari politik capres ke ulama atau dukungan yang diberikan organisasi keagamaan kepada capres tertentu tidak dapat dikatakan sebagai politik identitas.

“Jadi jangan semua hal dikaitkan dengan politik identitas. Itu mencari dukungan dari kiai yang di mana kiainya, tokoh agamanya, tokoh masyarakatnya banyak pengikutnya. Di situlah sebenarnya kepentingan dari para capres, termasuk Prabowo. Enggak ada istilah politik identitas di situ,” pungkas Ujang. •RDO



“Seyogiayanya Ganjar, termasuk (bakal calon presiden) yang lain tidak menggunakan isu agama karena itu sebagai satu larangan. Karena kita tahu, isu agama akan potensial menjurus kepada perpecahan”

Kaka Suminta

GANJAR MULAI PENCITRAAN ISU AGAMA DIMAINKAN

Tayangan azan maghrib yang memunculkan bakal calon presiden PDIP, Ganjar Pranowo, di televisi swasta nasional, menjadi buah bibir publik, lantaran mencitrakan diri di luar masa kampanye dan ditambah menggunakan identitas keagamaan.

Ganjar tampil di program azan maghrib RCTI menggunakan baju koko putih dan peci hitam di sebuah masjid. Dalam tayangan yang tersebar luas di media sosial, mantan Gubernur Jawa Tengah itu memeragakan berwudhu hingga salat berjemaah.

Larangan identitas keagamaan digunakan dalam kampanye politik diatur dalam Pasal 276 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang sanksinya terancam dipidana penjara maksimal satu tahun dan denda maksimal Rp12 juta terhadap pelanggar yang mengandung unsur kampanye itu.

Sementara, dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Jadwal, Tahapan, dan Program Pemilu Serentak 2024, ditetapkan jadwal kampanye jatuh pada 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024.

Sekretaris Jenderal Komite Pemantau Pemilu Independen (KIPP), Kaka Suminta, menilai, apa yang dilakukan Ganjar telah memenuhi unsur politisasi identitas dalam mencitrakan diri sebagai kandidat bakal calon presiden.

“Saya anggap itu menggunakan isu agama. Artinya minimal karena dia belum jadi kandidat, sebagai orang yang akan diusung oleh partai politik melalui deklarasi itu kan artinya sudah. Artinya sudah jelas PDIP akan mengusung Ganjar,” ujar Kaka saat dihubungi Info Indonesia, Jumat, 15 September 2023.

Menurutnya, penggunaan identitas agama dalam kegiatan politik praktis utamanya dalam menghadapi persaingan politik di Pemilu, harusnya tidak dilakukan oleh Ganjar yang tidak hanya didukung dan diusung oleh PDIP, tetapi juga oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Persatuan Indonesia (Perindo).

“Seyogiayanya Ganjar, termasuk (bakal calon presiden) yang lain tidak menggunakan isu agama karena itu sebagai satu larangan. Kedua, juga menjaga bangsa ini agar tidak terjadi perpecahan. Karena kita tahu, isu agama akan potensial menjurus kepada perpecahan,” ucapnya.

Kaka menyatakan, politik identitas

dalam Pemilu yang berimbas pada perpecahan di masyarakat, bukan hanya terjadi di Indonesia tapi juga di berbagai negara. Karena menurutnya, isu primordialisme keagamaan potensial memecah bangsa.

“Ya (misalnya) di Timur Tengah atau di negara lainnya. Artinya sebagai elite politik dan calon pemimpin misalnya, maka semua pihak harus menahan diri, termasuk Ganjar ini. Polemiknya Ganjar ini s a j a membuat

masyarakat terbelah. Nah, seharusnya peka ya, supaya kita terhindar dari perpecahan ini,” tuturnya.

Di samping itu, Kaka juga memandang Ganjar yang bebas memanfaatkan program azan sebagai sarana mencitrakan diri ke khalayak publik juga didukung oleh regulasi teknis yang amburadul disusun Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Kalau dari regulasi ini problematik, karena memang cara KPU menerjemahkan kampanye dan sosialisasi yang menjadikan kerancuan-kerancuan ini. Harusnya di PKPU tentang kampanye itu kalau sosialisasi jelas, tapi misalkan apa yang dilakukan Ganjar itu saya pikir bukan sosialisasi, karena Ganjar belum menjadi peserta Pemilu.

Sosialisasi kan untuk peserta Pemilu, dan sekarang baru partai politik,” tuturnya.

Sehingga, Kaka memandang, dari segi regulasi yang lemah membuat pelanggaran kampanye yang terjadi pada kejadian Ganjar semakin memperparah kinerja Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang tidak memiliki dasar hukum ataupun tidak berkepastian hukum dalam hal kampanye di luar jadwal.

“Harusnya yang dilarang ya dilarang, yang tidak masuk dalam kampanye atau sebelum masa kampanye dilarang. Apalagi yang ada dalam larangan kampanye seperti menggunakan isu-isu keagamaan, atau kemudian menggunakan simbol-simbol keagamaan,”
tutunya

Lebih lanjut, Kaka menganggap politisasi agama dalam pelaksanaan Pemilu tidak diperbolehkan, walaupun dengan munculnya Putusan MK Nomor 65/2023 terkait larangan kampanye di tempat ibadah, yang menurutnya juga membuat kacau.

“Tapi kan agama (tempat ibadah) tetap di-exclude (dikecualikan untuk diperbolehkan digunakan untuk kampanye). Artinya, dengan segala keputusannya (MK) yang masih debatable, tapi masih menganggap bahwa ruang keagamaan itu tidak boleh digunakan untuk politik,” katanya.

Dengan putusan MK seperti itu, Kaka menyimpulkan semua UU Pemilu yang selama ini ditelurkan pemangku pembuat undang-undang, jika diperhatikan sejak 2008 secara eksplisit melarang penggunaan sarana keagamaan.

“Kemudian di 2019 itu di UU 7/2017 dengan jelas larangan di Pasal 280 melarang isu-isu keagamaan. Artinya tidak boleh dipakai di masa kampanye. Harusnya ini juga di luar masa kampanye juga tidak boleh. Jadi jangan dibalik logikanya, kalau tidak boleh di masa kampanye tapi boleh di luar masa kampanye. Itu kan logika yang agak kurang tepat, yang biasanya di argumentasikan KPU dan Bawaslu,” katanya sembari mengungkit.

Oleh karena itu, Kaka memandang penyelenggara Pemilu turut berkontribusi dalam kekalutan masalah kampanye di luar jadwal dan penggunaan simbol-simbol agama melalui pembuatan regulasi yang tidak tegas dan jelas dalam menegakkan prinsip berkepastian hukum dalam Pemilu.

“Di PKPU 15 itu juga problem, karena tidak ada larangan dan sanksi pada PKPU 15/2023. Dan ketika KPU mengatakan itu ada di domain Bawaslu, maka Bawaslu juga sama bahwa berpikir tidak punya kewenangan untuk membuat ketentuan larangan dan sanksi di kampanye,” tutup Kaka. •RDO



“Sayang KPI sama halnya dengan KPU dan Bawaslu, juga kurang bertaji. Conflict of interest-nya sangat tinggi. Sebab mereka terpilihnya juga atas jasa para politisi di Senayan”

Zaki Mubarak



KPU DAN BAWASLU TAK BERTAJI DIAMKAN PELANGGARAN PEMILU

Komisi Pemilihan Umum (KPU) pekan ini kembali menjadi sorotan publik. Hal itu tidak terlepas lantaran mas-sifnya sejumlah peristiwa dilakukan oleh bakal calon presiden yang melakukan kegiatan kampanye terselubung di luar jadwal.

Adapun selain kandidat bakal capres, pelanggaran dugaan kampanye terselubung juga dilakukan sosok bakal calon anggota legislatif DPR RI, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Sementara itu, publik menyayangkan sikap KPU dan Bawaslu yang saat ini dinilai tidak cukup mampu menindak tegas sejumlah kegiatan yang disinyalir masuk dalam kategori kampanye terselubung di luar jadwal.

Dalam beberapa kesempatan, KPU dan Bawaslu menyebut kategori dugaan kegiatan pelanggaran kampanye terselubung dapat ditindaklanjuti apabila tokoh politik tersebut resmi terdaftar menjadi capres, caleg dan calon kepala daerah di dalam data rekapitulasi penyelenggara Pemilu.

Selain itu, kategori pelanggaran kampanye di luar jadwal dapat ditindaklanjuti oleh KPU ataupun Bawaslu apabila masuk dalam tiga unsur syarat yang telah ditetapkan PKPU 15/2023 tentang Kampanye.

Pertama, ada peserta pemilu atau pihak yang ditunjuk oleh peserta pemilu meyakinkan atau mengajak memilih. Kedua menawarkan visi misi, program kerja. Ketiga membentuk citra diri.

Berdasarkan definisi citra diri menurut PKPU 15/2023 adalah nomor urut dan lambang partai. Narasi itulah kemudian dinilai oleh sejumlah pihak sebagai narasi yang rancu lantaran dapat memberikan karpet merah terhadap para calon untuk melakukan kampanye di luar jadwal yang ditetapkan KPU.

Pengamat Politik dari Universitas Is-

lam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Zaki Mubarak, menilai, PKPU 15/2023 ditengarai memiliki celah perihai kekosongan hukum untuk menindak sejumlah pelanggaran dugaan kampanye terselubung di Pemilu 2024.

Zaki mengungkapkan, celah kosong yang terdapat dalam PKPU 15/2023 itu acapkali digunakan oleh para calon peserta Pemilu untuk mencuri start melakukan kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan KPU.

“Ya itu memang problem dan curi start seperti sudah lama berlangsung. Saya kira tiga calon kontestan capres telah melakukan curi start yang sama, hanya saja Ganjar belakangan lebih mencolok dengan muncul pada tayangan azan di perusahaan TV yang terafiliasi dengan ketum parpol pendukung Ganjar,” ungkap Zaki, Jumat, 15 September 2023.

Zaki melihat, peraturan perihai kampanye yang telah termaktub di dalam PKPU 15/2023 sejauh ini masih bersifat ambigu, sehingga memberikan celah kepada para peserta pemilu melakukan pelanggaran kampanye di luar jadwal ataupun bermanuver membangun framing citra diri yang secara tak langsung telah menunjukkan politik identitas.

“PKPU bersifat ambigu dan kurang bertaji. Alasan formilnya status ‘terduga pelanggaran’ masih belum jelas. Sebab, pencalonan capres

dan cawapres baru Oktober dan masa kampanye baru November 2023. Kalau dianggap melanggar, dalam status sebagai apa? Tidak jelas. Ini yang dimanfaatkan para calon kontestan terus bermanuver,” tegas Zaki.

Zaki mencontohkan, dalam kasus Ganjar pada tayangan azan, sejauh ini baik KPU, Bawaslu ataupun lembaga penyiaran seperti KPI juga tidak bisa mengambil tindakan bahwa hal itu diduga melanggar aturan kampanye di luar jadwal dan politik identitas.

“Media untuk penyiaran publik seharusnya non-partisan, oleh karena itu harusnya dilarang untuk ditumpangi kepentingan politik,” terang Zaki.

Menurut Zaki, munculnya masalah terkait dugaan kekosongan hukum menindak pelanggaran kampanye di luar jadwal acapkali dikaitkan dengan sistem rekrutmen dari lembaga penyelenggara Pemilu dan penyiaran yang dinilai cukup kental dengan konflik kepentingan.

Dugaan konflik kepentingan yang itu sejak lama telah eksis di dalam lembaga itu lantaran terpilihnya para anggota komisioner penyelenggara Pemilu bergantung pada uji kelayakan yang digelar oleh DPR.

“Sayang KPI sama halnya dengan KPU dan Bawaslu, juga kurang bertaji. Conflict of interest-nya sangat tinggi. Sebab mereka terpilihnya juga atas jasa para politisi di Senayan,” ucap Zaki.

Zaki menambahkan, kondisi itu yang akhirnya memunculkan rasa skeptis terhadap proses penindakan dugaan pelanggaran kampanye terselubung, sehingga hanya bergantung dengan etika dan moralitas personal politisi itu sendiri.

“Sebaiknya, para politisi yang hendak nyapres/nyawapres bersepakat dan

berkomitmen untuk menjaga politik yang fairnes dan berkeadaban. Jangan menabrak koridor kepatutan publik dengan curi start memanfaatkan aturan hukum yang banyak lobangnya,” kata Zaki.

Direktur Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie, menambahkan, aturan lkhwal penindakan larangan kampanye di luar jadwal hanya sebatas penghias bibir lantaran tidak satupun terduga pelanggaran ditindak tegas dan dijerat hukum.

Jery mengungkapkan, salah satu contohnya yakni dugaan pelanggaran kampanye di luar jadwal yang dilakukan Ganjar di tayangan azan TV swasta nasional yang hingga saat ini belum diputuskan untuk ditindak apakah bersalah atau tidak.

“Iya kan ini sebuah pembohongan publik. Nah, contohnya azan kemarin kan apa yang ditayangkan sebetulnya yang begitu kan publik sudah tahu identitas, tetapi bagaimana Bawaslu yang loyo gue bilang itu,” ujar Jerry.

Menurut Jerry, seharusnya KPU dan Bawaslu dapat memberikan tindakan tegas jika peserta Pemilu terbukti melakukan dugaan pelanggaran kampanye di luar jadwal ataupun melakukan pelanggaran pidana lainnya seperti politik uang ataupun politik identitas.

“Ya kayak kemarin kan bagi-bagi uang di masjid Jawa Timur. Salah satu caleg PDIP di Jawa Timur enggak diapa-apain gitu terus cawe-cawe buat saya sebetulnya Bawaslu itu bikin sebuah aturan untuk pelanggaran pertama SP3 itu bisa dibawa ke Mahkamah Agung untuk mendiskualifikasi calon tersebut yang terlibat,” jelas Jerry.

Jerry menegaskan, seharusnya Bawaslu dan KPU dalam memberikan efek jera kepada peserta pemilu yang melanggar aturan seperti membuat surat peringatan pertama, kedua dan ketiga atau melakukan skors, bahkan mendiskualifikasinya di catatan pencalonan Pemilu 2024.

Jerry menuturkan, jika para peserta Pemilu yang ditengarai melanggar aturan namun tidak kunjung diberikan sanksi tegas oleh KPU dan Bawaslu, maka publik akan skeptis terhadap kinerja penyelenggara Pemilu 2024.

Jerry menambahkan, penyelenggara Pemilu juga harus tegas dalam menegakan hukum kepemiluan. Terlebih dalam menyikapi situasi ke depan. Salah satunya dengan menganulir calon untuk tidak boleh ikut kontestasi kalau masih melakukan pelanggaran.

•RDO





“Perludem sama teman-teman Koalisi Perempuan di Pemilu ini mengingatkan putusan MA sama kaya putusan MK yang sifatnya final dan mengikat, jadi harus dilaksanakan”

Usep Hasan Sadikin

INFO
KPU

7

Minggu III • September 2023

KPU HALANGI PEREMPUAN DUDUK DI SENAYAN

Peraturan Komisi Pemilihan Pemilu (PKPU) Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Legislatif baik DPR RI dan DPRD, ternyata memuat pasal-pasal yang berpotensi menyumbat perempuan Indonesia untuk melenggang ke Senayan.

KPU dalam praktiknya menggunakan metode penghitungan pembulatan bilangan ke bawah, untuk memenuhi kuota 30 persen perempuan dalam proses pencalonan anggota legislatif yang termuat dalam Pasal 245 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Metode pembulatan ke bawah yang diterapkan KPU diatur pada Pasal 8 ayat (2) PKPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Legislatif baik DPR RI dan DPRD, yang intinya menjadikan keterwakilan 30 persen perempuan dalam pencalonan anggota legislatif sulit terpenuhi.

Sebagai contoh, jika di suatu daerah pemilihan (Dapil) anggota legislatif DPR terdapat 8 caleg, maka jika dikalkulasi jumlah 30 persen keterwakilan perempuannya adalah 2,4. Artinya, cukup hanya 2 orang yang mewakili di satu Dapil.

Konsekuensi logis dari PKPU tersebut lah yang dijadikan alasan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menggugat aturan teknis tahapan pencalonan anggota legislatif DPR dan DPRD itu ke Mahkamah Agung (MA).

Peneliti Perludem, Usep Hasan Sadikin, mengatakan, gugatan yang dilayangkan pihaknya telah berbuah manis. Sebab, MA telah menyatakan mengabulkan gugatan uji materiil Pasal 8 ayat (2) PKPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR RI dan DPRD.

“Putusan MA ini karena sifatnya final dan mengikat itu tidak terkait dengan pertanyaan, ‘ini berlaku buat Pemilu kapan ya?’ Dan bukan dimaknai sebagai rekomendasi,” ujar Usep kepada wartawan, di Jakarta Pusat, Jumat, 15 September 2023.

Usep juga menyayangkan pengaturan keterwakilan perempuan yang menggunakan metode pembulatan ke bawah diamini oleh DPR RI, dengan menyatakan Pasal 8 ayat (2) PKPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR RI dan DPRD sudah benar.

“Sebagaimana anggota DPR bilang, itu sayang sekali. Anggota DPR kita yang merupakan bagian

dari kekuasaan legislatif kita yang menghasilkan UU. Itu sampai ada pernyataan (dari DPR) menilai putusan MA sebagai rekomendasi, saya bingung,” ucapnya mengeluhkan.

Padahal jika diperhatikan secara saksama, Usep menilai seharusnya para wakil rakyat memahami ada ketidaktepatan antara peraturan teknis hitung-hitungan pemenuhan kuota 30 persen keterwakilan bakal calon anggota legislatif dengan UU Pemilu yang secara hukum lebih tinggi derajatnya.

“Ada kata minimal di situ. Enggak kayak yang rekrutmen anggota penyelenggara yang kalimatnya memperhatikan. Kalau pencalonan DPR atau DPRD itu kalimatnya adalah minimal 30 persen. Jadi saat dibulatkan ke bawah justru itu melanggar UU (Pemilu),” papar dia.

Namun hingga kini, Usep mendapati sikap KPU yang terkesan ogah menindaklanjuti putusan MA terkait perubahan norma mekanisme penghitungan 30 persen kuota bakal calon anggota legislatif perempuan.

Bahkan, dia menilai KPU seperti mengulur merevisi PKPU Nomor 10 Tahun 2023 agar tidak cekcok dengan partai politik.

“Ya ketika Komisi II DPR RI bertemu KPU, lalu menghasilkan P K P U yang

tidak memenuhi pencalonan 30 persen perempuan, itu sudah bentuk dari intervensi. Dan KPU sudah terkena intervensi itu. Jadi ada kemandirian dan netralitas (KPU) yang dicerai. Tidak mandiri karena diintervensi oleh pihak di luar KPU. Tidak netral karena DPR ada bagian dari fraksi parpol yang mana partai politiknya menjadi peserta Pemilu, yang dia setara dengan partai-partai politik di luar DPR ini,” tutur Usep.

“PKPU ini tidak hanya tidak mandiri, tapi tidak netral dari segi KPU, yang mana kemandirian maknanya netral. Karena di UUD

KPU dibuat mandiri, untuk tidak jadi bagian parpol KPU kita. Ya ini tidak sesuai peraturan perundangan,” s a m - bungnya. Menu-

rutnya, apabila KPU beralasan tidak mengubah aturan pencalonan anggota DPR RI dari kalangan perempuan, misalnya dengan menyebutkan waktu penyusunan daftar calon anggota legislatif terbatas waktu, maka tentu bisa dibalang tidak masuk akal.

“Saya malah bingung kalau alasan mepetnya tahapan jadi pembenaran pelanggaran UU ini. Karena kalau kita lihat tahapan yang sudah jelas, penetapan DPR dan DPRD sebagai calon tetap itu paling akhir November, dan kita masih di bulan September,” urai Usep.

“Kedua, yang bikin lambat ya KPU sendiri. Saya bingung dengan adanya pernyataan anggota KPU saat ada pelaporan ke DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu), saat ada JR (judicial review) ke MA, dibilangnya menghambat tahapan Pemilu. Justru yang jelas menghambat tahapan KPU sendiri yang membuat peraturan yang melanggar,” tambahnya menyimpulkan.

Maka dari itu, Perludem dalam hal ini mendorong KPU untuk taat azas hukum sebagai penyelenggara Pemilu 2024. Sebab, kedudukan putusan MA bersifat mengikat yang berarti harus dijalankan oleh lembaga terkait yang membuat peraturan perundang-undangan terkait.

“Perludem sama teman-teman Koalisi Perempuan di Pemilu ini mengingatkan putusan MA sama kaya putusan MK (Mahkamah Konstitusi) yang sifatnya final dan mengikat, jadi harus dilaksanakan. Kalo misalkan KPU bilang kami ini pelaksana UU ya harusnya dilaksanakan lah bagian dari UU ini, yang mana putusan MA itu setara dengan peraturan untuk mengoreksi ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu UU Pemilu,” tandas Usep. ●RDO



“Karena sampai saat ini, rival terkuat Ansar Ahmad dalam Pilkada nanti adalah Rudi”

Zamzami A Karim



DELAPAN TAHUN SUKSES PIMPIN BATAM, M RUDI DITUNTUT BANGUN KEPRI

Lebih dari setahun menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 telah memunculkan beberapa nama yang dianggap sebagai calon potensial untuk menjadi gubernur Kepulauan Riau.

Gubernur Kepri petahana, Ansar Ahmad, dan Wali Kota Batam, HM Rudi, adalah dua nama yang diprediksi oleh banyak pihak akan bertarung dalam Pilgub Kepri pada Pilkada Serentak 2024. Pertarungan antara keduanya untuk merebut kursi Kepri Satu di Pilkada Serentak 2024 mulai terlihat.

Menurut pengamat politik Kepri, Zamzami A Karim, Pilgub Kepri 2024 diprediksi akan menjadi pertarungan sengit antara Ansar Ahmad dan HM Rudi.

“Karena sampai saat ini, rival terkuat Ansar Ahmad dalam Pilkada nanti adalah Rudi,” kata Zamzami A Karim.

Direktur Perwakilan Public Trust Institute (PuTIn) Kepri, Robby Patria, mengungkapkan Rudi memiliki lebih banyak fleksibilitas dalam memilih calon gubernur 2024. Apalagi, dirinya adalah Ketua DPW Partai NasDem Kepri.

Rudi juga memiliki lebih banyak opsi dalam memilih pasangan calon wakilnya untuk Pilkada 2024.

“Rudi dapat mempertimbangkan tokoh-tokoh seperti Bupati Karimun, Aunur Rofiq atau Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Suhajar Diantoro, atau bahkan Profesor Abdul Malik, seorang guru besar di FKIP UMRH,” bebernya.

Robby juga menyoroti bahwa Rudi telah memperoleh kekuatan politik yang signifikan di Batam, mengingat ia telah menjabat sebagai wali kota selama dua periode sebelumnya dan saat ini menjabat sebagai Kepala BP Batam.

“Kemungkinan Rudi dengan

gan persentase 73 persen dalam pemilihan umum 2020 di Batam menjadi modal yang kuat untuk menghadapi Pilkada Kepri 2024,” jelasnya.

Oleh karena itu, Suhajar, Aunur, dan Abdul Malik merupakan calon yang potensial karena mereka berasal dari Karimun. Menurut Robby, mereka akan memberikan dampak positif karena cukup dikenal di tengah masyarakat Karimun dan Kepulauan Riau.

“Pentingnya peran pemilih dari Karimun sebagai pemilih kedua terbanyak setelah Batam, sehingga mereka memiliki peran kunci dalam menentukan hasil pilkada,” katanya.

Namun, Robby juga mencatat perbedaan pendekatan Ansar yang lebih cenderung memilih wakil gubernur dari Batam daripada Karimun. Hal ini dikarenakan Ansar berasal dari Bintan, sehingga secara politis, memilih wakil dari Karimun dianggap kurang strategis.

Oleh karena itu, Ansar mungkin akan mencari pendamping dari Batam untuk mengatasi kelemahan politiknya di Batam.

Pengamat politik dari Lembaga Survei Stratak Indonesia, Octarina Soebardjo, berpendapat bahwa Rudi memiliki kelayakan untuk maju dalam Pilgub Kepri 2024.

“Rudi layak maju di Pilgub Kepri. Ia terbilang sukses memimpin Batam selama delapan tahun ini. Batam telah mengalami kemajuan yang pesat di bawah kepe-

mimpinannya,” ungkapnya.

Salah satu pencapaiannya yang paling mencolok adalah kontribusi Batam yang hampir mencapai 70 persen dari produk domestik Kepri. Hal ini merupakan pencapaian yang luar biasa dari seorang wali kota yang telah membantu meringankan tugas gubernur.

Dengan prestasi kepemimpinannya yang sukses di Batam, Octarina berpendapat, Rudi sekarang sepatutnya memberikan kontribusinya kepada Kepri.

Octarina juga membicarakan mengenai sosok yang tepat untuk mendampingi Rudi jika maju dalam Pilgub Kepri 2024. Ia menyatakan bahwa Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, adalah sosok yang sangat cocok.

“Kepri cocok dipimpin oleh sosok kuat seperti Rudi. Keberhasilannya dalam memimpin Batam seharusnya diteruskan untuk membangun Kepri. Terkait dengan wakilnya, saya melihat Amsakar sangat cocok untuk men-

dampinginya. Amsakar telah mendampingi Rudi selama sekitar delapan tahun dalam membangun Batam,” ujarnya.

Namun, hingga saat ini, hanya Ansar Ahmad yang secara terang-terangan menyatakan kesiapannya untuk maju sebagai calon gubernur di Pilkada Serentak 2024. “Ya, saya siap maju,” kata Ansar Ahmad.

Namun, saat itu, Ansar belum memberikan informasi pasti tentang siapa calon pendampingnya di Pilgub Kepri nanti. “Masih dicari,” singkatnya.

Di sisi lain, nama-nama yang mungkin akan mendampingi Ansar dalam kontestasi politik 2024 juga mulai muncul, dengan nama Wakil Wali Kota Batam saat ini, Amsakar Achmad, menjadi salah satu yang paling mencuat.

“Amasakar? Ya, tanya Amsakar, mau nggak dia,” kata Ansar.

Baginya, setiap partai memiliki haknya masing-masing, mengingat perjalanan politik masih panjang dan konsolidasi kerja dianggap penting.

Sementara itu, Rudi, meskipun disebut-sebut sebagai calon gubernur di Pilgub Kepri, belum secara terbuka menyatakan niatnya untuk berkompetisi dalam pesta demokrasi tersebut. DPW Partai NasDem Provinsi Kepri tidak memberikan tanggapan yang jelas ketika ditanya tentang kesiapan Rudi.

Terkait soal apakah ia sudah mempersiapkan diri untuk maju sebagai calon gubernur Kepri di Pilkada Serentak 2024, lagi-lagi Kepala BP Batam itu tak menjawab dengan lugas.

“Masih lama lagi benda itu. Tahun 2024,” ujarnya. ●
IRY





“Bisa dikatakan Pemerintah Kota Palembang saat ini nyaris tanpa prestasi, ibaratnya hanya jalan di tempat. Tidak ada kemajuan yang mencolok”

Bagindo Togar

INFO PILKADA

Minggu III • September 2023

9

HENTIKAN PENCITRAAN, CARILAH PRESTASI

Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, resmi memilih Sekertaris Daerah Kota Palembang, Ratu Dewa, untuk menjadi Penjabat Wali Kota Palembang menggantikan Harnojoyo yang masa jabatannya habis pada 18 September 2023.

Dipilihnya Ratu Dewa menyisihkan dua nama lain yang juga diusulkan, yakni Asisten III Bidang Administrasi dan Umum Setda Pemrov Sumsel, Kurniawan, dan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumsel, Basyaruddin Akhmad.

Pengamat politik Kota Palembang, Bagindo Togar, menyebutkan bahwa dari semua kandidat yang ada, Ratu Dewa dianggap layak menjadi Penjabat Wali Kota Palembang.

Hingga saat ini, masih banyak kinerja Harnojoyo yang belum terselesaikan. Dia mencontohkan, dalam menyelesaikan permasalahan saat musim kemarau, Harnojoyo tidak bisa berbuat apa-apa. Padahal banyak yang bisa dilakukan.

Tidak hanya itu, pekerjaan rumah lain yang masih belum bisa diselesaikan adalah birokrasi dan pembangunan.

“Bisa dikatakan Pemerintah Kota Palembang saat ini nyaris tanpa prestasi, ibaratnya hanya jalan di tempat. Tidak ada kemajuan yang mencolok,” tegasnya.

Buruknya pasar, drainase buruk, banjir, macet, pelayanan kesehatan dan masih banyak hal lain yang tidak bisa diselesaikan. Sehingga, Ratu Dewa harus mulai menyelesaikan permasalahan yang menjadi prioritas, yakni pelayanan umum, perbaikan jalan, banjir hingga penataan pasar dan rumah sakit serta tidak meninggalkan beban yang besar pada wali kota selanjutnya.

Bagindo Togar meminta Ratu Dewa tidak hanya melakukan pencitraan seperti yang dilakukan oleh Harnojoyo. Sudah saatnya menunjukkan integritas dengan kerja nyata.

“Karena seperti yang kita tahu, Harnojoyo ini sangat piawai melakukan pencitraan. Ratu Dewa ini kan mabuk pencitraan” ulasnya.

Bahkan, Bagindo Togar sangat meyakini bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Harnojoyo terbilang rendah karena nyaris tanpa prestasi dan tanpa trobosan yang mencolok.

Akademisi dan pengamat politik, Ade Indra Chaniago, menambahkan, banyak sekali PR yang harus diselesaikan oleh Ratu Dewa. Terlebih pada tiga sektor, yakni pendidikan, kesehatan dan lapangan pekerjaan.

“Jangan sampai permasalahan sebelumnya berulang. Sebagai penjabat, Ratu Dewa harus memilih orang yang berkuali-

tas dengan latar belakang pendidikan yang kuat,” tambahnya.

Begitu juga dari segi kesehatan, Ratu Dewa harus bisa mengubah masyarakat menjadi lebih sehat, bukan selalu terkait dengan pengobatan. Sehingga alokasi biaya kesehatan bisa digunakan untuk sektor lain, seperti UKM untuk mensejahterahkan masyarakat dan membantu perekonomian.

“Begitu juga dengan lapangan pekerjaan, Ratu Dewa harusnya mampu melakukan percepatan untuk memberikan solusi karena bisa mengambil kebijakan,” ulasnya.

Diharapkan dengan menjabat sebagai Penjabat Wali Kota Palembang, apa yang dikerjakan Ratu Dewa indikasinya bisa terlihat di tahun depan.

Pengamat lingkungan, sosial dan budaya, Ali Goik, menjelaskan masih banyak PR yang disisakan oleh kepemimpinan Harnojoyo-Fitrianti Agustinda ke Ratu Dewa. Banyak cagar-cagar budaya di Kota Palembang yang sudah teregistrasi di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tapi belum ada Surat Keputusan (SK) Cagar Budaya di Pemerintah Kota Palembang.

Seperti Makam Pangeran Kramojoyo, menantu Sultan Mahmud Badaruddin (SMB) II Palembang di Kelurahan 15 Ilir Palembang. Makam Sultan Mansyur, keturunan raja Kesultanan Palembang Darussalam di Jalan Sultan Mansyur Palembang. Gedung Kesenian yang merupakan bekas KBTR di Plasa Benteng Kuto Besak (BKB) Palembang yang belum disahkan.

Direktur Yayasan Depati ini mengkritik kepemimpinan Harnojoyo-Fitrianti Agustinda yang tidak melaksanakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sesuai Perda Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2012.

“Belum tersedianya Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebanyak 30 persen dari luasan Kota Palembang, tidak mengembalikan fungsi rawa konservasi seluas 2,1 hektare, tidak menyediakan kolam retensi yang sesuai. Harusnya kedalaman 6 meter untuk lumpur,” katanya.

Seharusnya pemerintah bisa menyediakan kolam retensi yang cukup sebagai fungsi pengendalian banjir dan saluran drainase yang memadai. Hal itu meliputi saluran primer, sekunder, tersier serta terhubung dengan kolam retensi dan masing-masing Daerah Aliran (DAS) yang diolah menjadi air, sesuai baku mutu air bersih.

Sehingga, air sungai yang tercemar limbah rumah tangga seperti sabun, deterjen dan lainnya, bisa diolah sebagai fungsi pengendalian banjir di Kota Palembang.

Dia juga mengkritik kurangnya penanganan sampah oleh

Pemkot Palembang, sehingga kerap terjadi banjir parah, terutama pada 25-26 Desember 2021. Hal itu menurutnya sudah masuk perbuatan melanggar hukum oleh Pejabat Pemerintah (onrechtmatige overheidsdaad).

Dia juga menyalahkan Pemkot Palembang yang belum menyediakan tempat pen-

gelola sampah yang berdampak pada pencemaran udara dan air. Serta belum

adanya posko bencana banjir di lokasi terdampak banjir di beberapa titik di Kota Palembang.

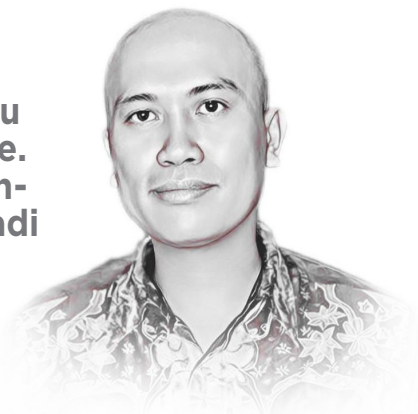
Tugas lain yang harus dilakukan Ratu Dewa yang sangat penting yakni menghidupkan kembali anak-anak sungai agar banjir tidak terjadi lagi.

“Pemerintah harusnya menyediakan posko bencana banjir itu, sebagai bentuk kesiapsiagaan, peringatan dini dan mitigasi bencana ke warga Palembang, dalam tanggap darurat bencana berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang menyebabkan terlanturnya korban banjir,” katanya. •IRY



“Sejauh ini kansnya besar, kalau maju di Jawa Barat dua periode. Elektabilitas 40-an persen. Bahkan, kalau misalnya Dedi Mulyadi dikeluarkan dari simulasi itu 71 persen Kang Emil”

Firman Manan



DEDI MULYADI SIAP PIMPIN JABAR, PONDASI GERINDRA KUAT

Pemilihan Gubernur Jawa Barat tahun depan diprediksi akan banyak kejutan. Apalagi, Ridwan Kamil sebagai petahana masih belum diketahui apakah akan bertarung di untuk periode kedua di Jawa Barat atau beralih ke DKI Jakarta.

Jika Ridwan Kamil tetap maju di Jawa Barat, sejumlah nama besar sudah muncul untuk menjadi penantang mantan Wali Kota Bandung itu.

Pengamat politik, Firman Manan, menyebutkan, sejumlah hasil survei menyatakan bahwa mantan Bupati Purwakarta yang kini menjadi anggota DPR, Dedi Mulyadi, adalah satu-satunya kandidat kuat yang dapat menjadi pesaing Ridwan Kamil dalam Pemilihan Gubernur Jawa Barat 2024.

Menurut Firman, berdasarkan hasil simulasi, elektabilitas Ridwan Kamil memang yang paling tinggi. Ini disebabkan oleh statusnya sebagai petahana dan tingkat kepuasan masyarakat Jabar yang mencapai 86 persen.

Elektabilitas Kang Emil, menurut Firman, mencapai lebih dari 40 persen. Sementara, Dedi Mulyadi mendapatkan sekitar 20 persen, diikuti oleh

Dede Yusuf, Deddy Mizwar, Mochammad Iriawan (Iwan Bule), Saan Mustopa, dan Ono Surono, yang semuanya berada di bawah 10 persen.

Firman menyatakan, saat ini, kesempatan Kang Emil untuk maju dalam dua periode di Jawa Barat sangat besar. Bahkan, jika Dedi Mulyadi dihapus dari simulasi survei, elektabilitas Kang Emil tetap tertinggi mencapai 71 persen.

“Sejauh ini kansnya besar, kalau maju di Jawa Barat dua periode. Elektabilitas 40-an persen. Bahkan, kalau misalnya Dedi Mulyadi dikeluarkan dari simulasi (survei), itu 71 persen Kang Emil,” ujar Firman.

Meskipun elektabilitas Kang Emil terhadap kandidat lain relatif tinggi, Firman mengakui Dedi Mulyadi memiliki keunggulan karena Partai Gerindra memiliki basis yang kuat di Jawa Barat.

“Partai yang dipimpin oleh Prabowo Subianto tersebut mendominasi suara dan parlemen provinsi pada pemilihan legislatif 2019,” tambahnya.

Firman menekankan, jika Partai

Gerindra memutuskan untuk mengusung Dedi Mulyadi dalam Pilgub Jabar 2024, hal ini dapat menjadi ancaman serius bagi Ridwan Kamil. Sebab, Partai Gerindra memiliki fondasi yang kuat di provinsi tersebut.

Firman juga mencatat bahwa elektabilitas Partai Golkar, partai politik yang didukung oleh Ridwan Kamil, belum sebaik Partai PDIP, Partai Gerindra, dan PKS. Meskipun secara pribadi Ridwan Kamil memiliki elektabilitas tinggi, dia punya tugas berat untuk menyamakan dukungan individu terhadap dirinya dengan dukungan terhadap Partai Golkar.

Menurut Firman, ini akan menjadi tantangan bagi Ridwan Kamil dalam upaya untuk menjaga popularitas pribadi dan memastikan bahwa dukungan terhadapnya dan Partai Golkar seimbang. Sehingga, ia dapat melanjutkan masa jabatannya sebagai gubernur Jawa Barat dalam periode kedua.

Dedi Mulyadi sendiri dengan tegas menyatakan kesiapannya untuk mencalonkan diri dalam Pilgub Jawa Barat 2024. “Saya mah tidak siap jadi calon gubernur, saya mah siap jadi gubernur,” tegas Dedi Mulyadi.

Meskipun begitu, mantan Bupati Purwakarta

ini menegaskan bahwa keputusan mengenai calon gubernur Jawa Barat yang akan diu-

sung Partai Gerindra akan sepenuhnya ditentukan oleh Prabowo Subianto.

Menurut Dedi, pada saat ini, fokus utama Partai Gerindra adalah memenangkan Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024.

“Pilpres dulu menangkan Pak Prabowo, menangkan Partai Gerindra, nanti kalau Pak Prabowo sudah menang dan Gerindra kursinya sudah banyak, maka Pilgub kan gampang tinggal siapa yang elektabilitas dan popularitasnya tinggi,” jelasnya.

Dedi Mulyadi juga menekankan bahwa seluruh kader Gerindra sudah disiapkan untuk menjadi pemimpin. Apabila mereka mendapatkan tugas langsung dari Ketua Umum Partai Gerindra, maka setiap kader wajib mengikutinya.

“Semua kader Gerindra sudah menyiapkan diri. Tinggal dipilih saja oleh Bapak (Prabowo Subianto) nanti. Semua kader siapkan diri untuk menjadi pemimpin,” tambahnya.

Sementara, Partai Demokrat telah menyiapkan dua kader untuk mencalonkan dalam Pilgub Jabar 2024. Hal ini diungkapkan oleh Sekretaris DPD Partai Demokrat Jawa Barat, Handarujati Kalamullah.

Menurut Handarujati, para DPC Partai Demokrat se-Jawa Barat telah melakukan pertemuan untuk memutuskan calon gubernur Jabar 2024 dan hasilnya mengerucut pada dua nama.

“Dalam hasil rapat kerja daerah kemarin, muncul dua nama yang berpotensi untuk diusung, yaitu Dede Yusuf dan Cellica Nurrachadiana. Namun, kami masih menunggu arahan lebih lanjut,” ujar Handarujati, Minggu, 10 September 2023.

Dede Yusuf adalah mantan Wakil Gubernur Jawa Barat yang pernah menjabat pada periode 2008-2013, sehingga dianggap memiliki kapasitas dan pengalaman untuk memimpin Jawa Barat. Sementara itu, Cellica adalah Bupati Karawang yang juga dikenal memiliki dukungan yang kuat dari masyarakat.

“Kedua nama ini adalah kader terbaik Partai Demokrat yang diyakini mampu memimpin Jawa Barat dengan baik,” tambahnya.

Tidak hanya itu, Desy Ratnasari juga menjadi sorotan dan dikabarkan bakal maju dalam Pilgub Jawa Barat 2024. Ia mengatakan dirinya mendapat mandat dari Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan.

“Betul banget, Insya Allah iya. Saya itu mendapatkan mandat atau penugasan dari Pak Zulkifli Hasan,” ungkap Desy Ratnasari.

Ia pun mengaku maju dalam Pilgub bukan merupakan keinginannya sendiri. Melainkan dirinya harus mengikuti perintah dari ketua partai politik. Bahkan, dirinya yang kini menjabat sebagai Ketua DPW PAN Jawa Barat juga merupakan penugasan dari partai.

“Ya iya lah (harus patuh) kalau mendapatkan tugas di mana pun,” pungkasnya. ●
IRY





“Mereka belum berani secara tegas menyampaikan visi-misi mereka kepada publik”

Usman Lamreung

CAGUB ACEH TAK PUNYA GAGASAN

Sejumlah nama tokoh Aceh mulai mencuat sebagai kandidat potensial calon gubernur pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Sayangnya, para calon yang muncul dinilai belum menunjukkan gagasan yang konkret dan menarik untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi Aceh.

Hingga saat ini, beberapa nama telah muncul sebagai calon potensial, seperti Abdullah Puteh, M Nasir Djamil, Muzakir Manaf, Sudirman (Haji Uma), Aminullah, dan Yusuf A Wahab (Tu Sop).

Namun, kemunculan nama-nama calon gubernur Aceh ini masih kabur. Hanya Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang secara terang-terangan mengusung kadernya untuk Pilgub Aceh 2024, yaitu M Nasir Djamil.

Pengamat politik Universitas Abulyatama (Unaya), Usman Lamreung, menyatakan, dari nama-nama calon yang telah muncul, belum terlihat adanya gagasan yang menarik untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi Bumi Serambi Mekah, termasuk masalah kemiskinan.

Usman menyebut, gerak-gerik para calon saat ini masih terbatas pada kegiatan seremonial dan sosial lainnya. “Mereka belum berani secara tegas menyampaikan visi-misi mereka kepada publik,” ungkapnya.

Dengan demikian, Usman menyimpulkan bahwa para calon yang muncul belum memiliki gagasan yang konkret, konsep yang matang, atau ide-ide kreatif.

Usman juga menekankan pentingnya para calon gubernur ini untuk mengungkapkan dengan jelas visi dan misi mereka kepada masyarakat Aceh. Sehingga masyarakat dapat memahami dasar dari pencalonan mereka sebagai gubernur Aceh.

Kekhawatiran muncul jika calon-calon tersebut tidak mampu mengungkapkan tujuan, gagasan dan visi mereka dengan jelas. Sebab, hal ini dapat menyebabkan situasi di mana masyarakat hanya “membeli kucing dalam karung” dalam Pilkada 2024.

Usman juga menyoroti berbagai masalah yang masih belum terselesaikan di Aceh, terutama masalah kemiskinan, yang tidak bisa diabaikan karena memiliki dampak dari lima tahun sebelumnya.

Oleh karena itu, ia mendesak para calon untuk memiliki gagasan yang jelas, konsep yang solid, dan rencana yang kuat dalam menangani masalah-masalah tersebut dan membawa Aceh ke masa depan yang lebih baik.

“Pada hal di antara mereka ada yang sudah pernah menjabat sebagai gu-

bernur Aceh periode yang lalu, seperti Abdullah Puteh dan Wakil Gubernur Aceh, Muzakir Manaf. Jika dilihat mereka ini punya potensi lebih, namun sampai detik ini tidak terlihat gagasan yang konkret,” ulasnya.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Bardan Sahidi, menyatakan telah mengumumkan dukungannya untuk kandidat calon gubernur Aceh pada Pilkada 2024.

Menariknya, dalam pernyataannya, Bardan Sahidi tidak hanya membicarakan kriteria calon gubernur Aceh, tetapi juga langsung menyebut nama orang yang akan diusung oleh PKS untuk posisi tersebut, yaitu M Nasir Djamil.

Sebagai perwakilan PKS, Bardan Sahidi dengan tegas menyatakan bahwa mereka telah bersiap untuk memenangkan M Nasir Djamil sebagai calon gubernur Aceh.

“Sebagai kader partai akan berjuang dengan sepenuh hati untuk mendukung M Nasir Djamil dalam pemilihan tersebut,” katanya.

PKS juga mengindikasikan kesiapannya untuk berkoalisi dan bersinergi dengan semua partai, baik lokal maupun nasional, dengan tujuan membangun Aceh menjadi lebih baik dan sejahtera.

Bardan Sahidi juga mengungkapkan visi dari Nasir Djamil sebagai calon gubernur Aceh yang fokus pada kesejahteraan masyarakat dengan empat langkah.

Pertama, menjaga keamanan, ketertiban, dan perdamaian sehingga rakyat Aceh dapat tidur nyenyak.

“Kedua, me-

mastikan ketersediaan bahan pangan agar perut rakyat Aceh tetap kenyang, mengingat Aceh adalah lumbung pangan nasional,” bebernya.

Ketiga, memastikan rakyat Aceh memiliki penghasilan yang cukup untuk sekolahkan anak, berobat, dan berusaha. Keempat, membangun Aceh dengan dukungan partai politik dan elemen masyarakat.

“Dengan kinerja yang dianggap ideal, Nasir Djamil diharapkan mampu memimpin Aceh selama lima tahun ke depan,” sambungnya.

Keberhasilan dalam membangun Aceh tidak hanya bergantung pada satu pihak, tetapi harus melibatkan partai politik dan seluruh elemen masyarakat. Itu adalah harapan bersama untuk masa depan yang lebih baik bagi Aceh.

Sementara Anggota DPR Fraksi PKS, Nasir Djamil, telah mengumumkan niatnya untuk maju sebagai calon gubernur Aceh pada Pilkada 2024. Langkah politiknya untuk ikut dalam Pilkada Aceh ini telah dipertimbangkan secara matang dan telah mendapatkan restu dari keluarga dan teman-temannya.

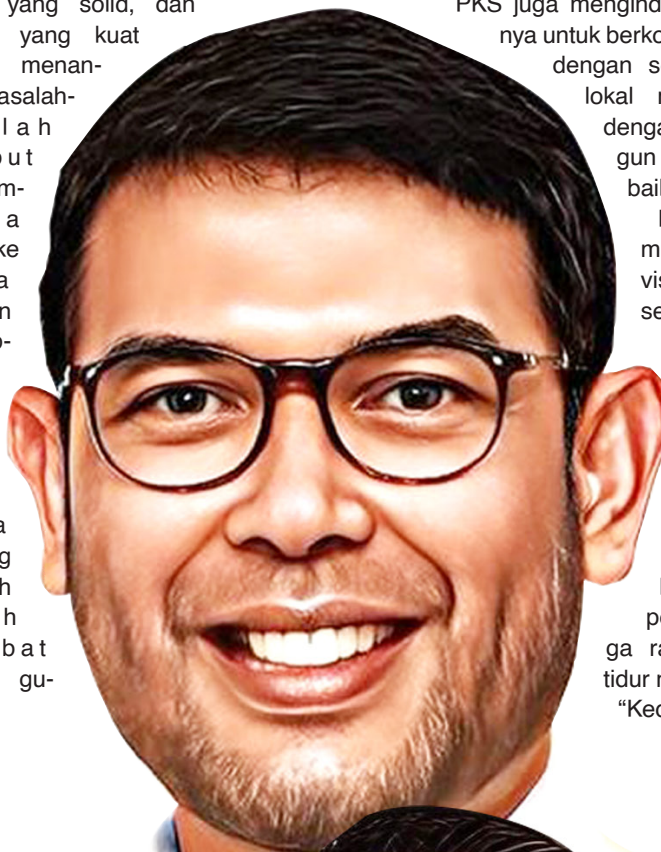
Nasir Djamil juga menyatakan keyakinannya bahwa pengalamannya sebagai anggota DPR selama beberapa periode akan menjadi modal berharga dalam memimpin Aceh ke depan.

“Ke depan kita terus mendorong dan mengawal kebijakan pemerintah pusat memihak kepada Aceh,” katanya.

Nasir Djamil juga mencatat bahwa karena Pilkada Aceh akan diadakan setelah pemilihan legislatif, maka dia berencana untuk mencalonkan diri kembali sebagai anggota DPR terlebih dahulu sebelum mengajukan diri sebagai gubernur Aceh.

Dia juga memohon doa dan dukungan dari masyarakat, khususnya dari teman-teman di Kota Langsa. “Insya Allah bila dipercayakan, saya siap memimpin Aceh di masa yang akan datang,” pungkasnya.

●IRY



“Alasan maju nyaleg lagi karena ada beberapa perempuan duduk di parlemen yang tidak terlalu speak-up ke perempuan. Apalagi tentang kekerasan perempuan dan anak, pelecehan seksual ke anak”

Risdiana



SUDAH PERNAH GAGAL, COBA LAGI DI PILEG 2024

Kader partai, tokoh masyarakat, hingga warga Sumatera Selatan berbondong-bondong mencalonkan diri menjadi calon anggota legislatif pada Pileg 2024.

Banyak caleg petahana yang kembali mencoba peruntungan di Pemilu 2024, namun tak sedikit juga wajah-wajah baru yang siap bersaing untuk menduduki kursi legislatif.

Di antara para caleg yang sudah mendaftarkan diri melalui partai politik, banyak di antara mereka yang pernah menelan kekalahan di Pileg tahun-tahun sebelumnya. Kalah saing dengan kandidat lain tak membuat para caleg ini patah arang.

Dengan berbagai strategi baru dan modal dana yang tak sedikit, mereka kembali menggantungkan nasib di Pileg 2024. Dukungan yang besar dari partai dan masyarakat, membuat para caleg yang pernah kalah ini optimistis bisa menang.

Risdiana yang merupakan caleg DPRD Sumsel dari Daerah Pemilihan 3 pernah menelan kekalahan di Pileg 2019. Namun dia tak putus asa untuk kembali mencalonkan diri melalui PDIP.

Kekalahannya di lima tahun lalu saat mencalonkan diri di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur karena cakupan dapilnya terlalu luas, sehingga dia terkendala untuk mengaksesnya. Ditambah saat itu dia masih minim akomodasi.

Tapi pada Pileg 2024, dapilnya di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) dan Ogan Ilir (OI), mampu dijangkaunya. Apalagi dia lebih menekankan pendekatan ke masyarakat dari hati ke hati. Kehad-

irannya dalam daftar caleg di Pileg 2024 membawa misi khusus.

“Alasan maju nyaleg lagi karena ada beberapa perempuan duduk di parlemen yang tidak terlalu speak-up ke Perempuan. Apalagi tentang kekerasan perempuan dan anak, pelecehan seksual ke anak. Dari data yang saya dapat, ada kenaikan tingkat kekerasan perempuan dan anak sebanyak 40 persen di Polres Banyuasin. Inilah yang harus diberantas,” katanya.

Menjadi perwakilan perempuan, Koordinator Sengketa Konflik Agraria di Komite Reforma Agraria Sumsel (KRASS) ini juga ingin lebih banyak berkontribusi dalam pembangunan basis perempuan. Dia merasa tidak puas dengan kinerja anggota dewan perempuan saat ini.

Isu lainnya yang menjadi sorotannya yakni tingginya kasus perundungan anak di sekolah yang berakhir pada keberpihakan orang-orang berkuasa. Tren perundungan inilah yang akan diberantasnya melalui peraturan-peraturan daerah yang akan didorong.

“Banyak perempuan jadi wakil rakyat, tapi serapan aspirasi masyarakatnya mana. Program hanya dijalankan di awal saja, tapi lama-lama menghilang. Walau di lapangan ada ancaman nantinya, saya tidak pernah takut, karena perempuan bisa lebih tangguh dari laki-laki,” ucap Anggota Badan Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat) DPC PDIP Palembang.

Kendati tidak mempunyai modal besar dalam berkampanye, dia yakin perjuangannya untuk mengantar aspirasi masyarakat, khususnya perempuan dan

anak, bisa membawakan kemenangan untuknya nanti.

Risdiana juga siap menghadapi persaingan karena sudah dididik dan dikaderisasi oleh orang-orang yang tepat di PDIP, sehingga membentuknya menjadi caleg yang tangguh.

“Saya tidak mau pakai money politic, cukup pendekatan heart to heart saja ke masyarakat. Kalau ada caleg yang pakai uang, saya akan membantu dengan kemampuan saya, seperti pengobatan terapis, agar masyarakat lebih sehat,” ungkap Sekretaris Bidang Seni dan Budaya Gerakan Cinta Rakyat (Gencar) Palembang ini.

Wakil Rakyat 10 Tahun

Semangat yang kuat untuk memenangkan kontestasi Pileg 2024 juga masih menggebu-gebu di hati Jon Harno, caleg DPRD Palembang dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Dapil 4, yang meliputi Sako, Sematang Borang, Kalidoni, dan 13 kelurahan di Palembang.

Pada 2009-2019, dia pernah menduduki jabatan sebagai wakil rakyat di DPRD Palembang melalui Fraksi Partai Gerindra. Sepuluh tahun mengabdikan dan memperjuangkan hak-hak masyarakat Palembang akhirnya terhenti pada Pileg 2019.

Suaranya kurang sekuat ini karena dia harus merelakan po-

sisinya untuk caleg yang menang. Namun di Pileg 2024, dia memilih hijrah dari Partai Gerindra ke PKB dan kembali mencalonkan diri.

“Ada banyak hal yang masih belum terwujud sepenuhnya ketika saya duduk di kursi parlemen. Seperti membangun kesejahteraan daerah, memperkecil ketimpangan sosial, pembangunan irigasi, pengadaan pompa air dan kesejahteraan untuk nelayan-nelayan di perairan Sungai Lais,” ucapnya.

Pernah menang dua periode di Pileg, dia pun sudah paham bagaimana mendapatkan lagi kepercayaan masyarakat ke dirinya. Pengusaha ini tidak ingin membaaur ke masyarakat ketika butuh saja, namun hilang ketika sudah terpilih nanti.

Dia juga tidak ingin menerapkan money politic saat pendekatan ke Masyarakat. Harus dipilih berdasarkan rasional dan masuk akal, serta tidak ingin memberikan janji-janji manis yang sulit terealisasi jika dia terpilih.

Kiagus Achmad Faqowini, caleg DPRD Kota Palembang dari Partai Amanat Nasional (PAN) juga akan Kembali bertarung di Pileg 2024. Pada 2019, dia bergabung dengan Partai Nasdem dan jadi caleg di dapil Kabupaten Ogan Ilir yang berakhir kekalahan.

“Meskipun saat itu bukan basis saja tapi sebagai kader partai, apapun permintaan partai akan saya jalani. Namun per Oktober 2022, saya hijrah ke PAN, karena sudah tidak satu ideologi lagi dengan partai sebelumnya. Ada hal-hal baru yang saya dapatkan di PAN, apalagi sebagai perwakilan anak muda,” katanya.

Kali ini, dia terdaftar sebagai caleg PAN Dapil 1 DPRD Palembang yang meliputi Kecamatan Ilir Barat 1 dan 2, Bukit Kecil dan Gandus Palembang. Alasannya kembali maju di Pileg 2024 bukan untuk menambah pundi-pundi kekayaannya.

Saat ini dia sudah merasa cukup perekonomiannya, namun gelora pejuang dan aktivis yang kembali menggerakkannya untuk mengabdikan diri ke masyarakat. Di usianya yang kini 33 tahun, dia ingin berkontribusi untuk masyarakat, terutama dalam menegakkan keadilan sosial.

“Insya Allah diamanatkan oleh masyarakat dan diridhoi Allah SWT, saya bisa menjadi wakil rakyat nantinya. Bisa mendorong pemerintah melalui perda-perda, untuk perubahan yang lebih baik lagi. Saya memilih Palembang, karena saya tinggal di Palembang dan putra daerah. Saya ingin melakukan politik balas budi. Ketika tidak menjadi apa-apa, tetap dihargai masyarakat. Namun saat saya diamanahkan jadi wakil rakyat, saya akan menghargai kebaikan masyarakat ke saya,” ucapnya.

Beberapa kegiatan yang sudah dilakukannya untuk lebih dekat ke masyarakat, mulai dari diskusi ke berbagai elemen masyarakat di banyak sektor, baik sektor pendidikan, UMKM dan menyerap aspirasi masyarakat yang belum tersampaikan ke pemerintah. •RDR





“Kita Indonesia tidak boleh dipecah belah oleh agama suku atau apapun. Saat merdeka kita berjuang tidak bertanya kamu dari agama apa, suku apa, dan lainnya”

Ahmad Al-Azhar

POLITIK IDENTITAS SUDAH TAK LAKU TAPI MASIH BERLAKU

Dinamika politik jelang Pemilu 2024 akan berbeda jauh dengan pesta demokrasi sebelumnya. Istilah cebong dan kampret seakan musnah seiring berakhirnya kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan pelaksanaan Pemilu 2024.

Politik identitas yang sempat muncul di awal tahun dengan mengangkat rekam jejak dan asal calon presiden juga perlahan mulai hilang. Sementara di daerah nuansa pecah belah itu nyaris tidak ada.

Dampak buruk politik identitas ini sepertinya sudah dirasakan para kader partai di daerah, sehingga mereka sepakat untuk tidak mengangkat isu pecah belah itu di Pemilu 2024.

Bendahara DPD PDIP Sumsel, Yudha Rinaldi, mengatakan, dampak dari politik identitas cukup serius karena bisa menyengserang golongan tertentu yang menimbulkan diskriminasi hingga menjadi isu yang memecah belah bangsa.

“Pak Prabowo juga menyatakan jangan ada politik identitas, jangan sampai ada lagi istilah cebong dan kampret. Kita sama-sama satu Indonesia jangan ada indikasi memecah belah bangsa. Tidak ada politik identitas, baik membawa suku agama dan sebagainya,” kata dia.

Dia mengatakan, semua partai politik tujuannya pasti sama yakni ingin memajukan bangsa Indonesia. Lalu, karena hanya ingin pencitraan jadi memecah belah dengan isu politik identitas tersebut.

“Ibu Megawati juga menyampaikan kepada kami jangan ada yang menyengserang partai lain. Hal itu baik soal apapun. Perintah ketua umum kita sampaikan saja yang positif dari bapak Ganjar Pranowo,” tuturnya.

Terkait hal positif ini, PDIP sudah memberikan hasilnya lewat pembangunan yang dilakukan Presiden Jokowi. Sementara apa yang akan ditinggalkan Jokowi nantinya akan dilanjutkan kembali oleh Ganjar Pranowo.

“Yang jelas banyak program presiden kita Pak Jokowi sangat dirasakan rakyat itu harus diteruskan. Lalu, PR Pak Jokowi yang belum selesai juga akan dilanjutkan oleh Pak Ganjar. Contoh program Pak Jokowi yang dirasakan rakyat seperti jalan tol dan pembangunan infrastruktur,” paparnya.

Sementara, Ketua DPD Partai Hanura Sumsel, Ahmad Al-Azhar, mengatakan, isu dan istilah politik identitas dibuat oleh oknum-oknum tertentu yang sengaja untuk memecah belah. Namun isu itu sepertinya sudah basi dan tidak laku lagi dijual.

“Kita Indonesia tidak boleh dipecah belah oleh agama suku atau apapun. Saat merdeka kita berjuang tidak bertanya kamu dari agama apa, suku apa, dan lainnya,” tegasnya.

Diakukinya, Partai Hanura lebih fokus memikirkan kesejahteraan rakyat dibandingkan sibuk melakukan politik identitas.

“Kami ingin memberikan kepada masyarakat tentang bagaimana kesejahteraan itu merata. Partai Hanura akan memperjuangkan itu. Bagaimana kesejahteraan itu bisa dirasakan di tingkat desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten hingga ke kota-kota

besar di Indonesia. Intinya, Hanura akan memperjuangkan kesejahteraan merata untuk rakyat Indonesia,” jelasnya.

Harus Punya Identitas

Sikap tegas juga disampaikan Ketua DPW Partai Ummat, Niko Pransisco, yang menyebut istilah dan isu politik identitas itu dibentuk oleh kumpulan buzzer yang memanfaatkan akun media sosial untuk membuat isu tersebut.

“Kalau soal identitas semua orang sudah tahu kalau Partai Ummat berlandaskan Islam Rahmatan Lil Alamin. Tentunya bukan berarti harus dikotak-kotakan dengan politik identitas apapun, misalnya agamis, nasionalis dan sebagainya,” ungkapnya.

Dia mengakui, Partai Ummat lebih fokus memberikan sesuatu yang nyata kepada umat dibandingkan membangun citra dengan politik identitas seperti itu.

“Kalau kami fokus ingin memberikan apa yang dibutuhkan masyarakat bukan hanya janji dan membangun citra. Apabila kebutuhan masyarakat terjamin kesehatan juga akan ikut terjamin. Pastinya kita akan memberikan kebutuhan masyarakat juga, termasuk soal lapangan pekerjaan,” tuturnya.

Ketua DPW Partai Bulan Bintang (PBB) Sumsel, Armansyah, menjelaskan, politik jangan sampai dikotak-kotakan karena akan berbahaya. Menurutnya, adanya politik identitas masyarakat harus cerdas meresponnya dan jangan ikut terpecah belah.

“Berpolitik sah-sah saja

tetapi persatuan dan kesatuan tetap harus kita jaga. Tentunya jangan sampai ada politik identitas yang disinyalir bisa mengkotak-kotakan seperti itu. Nah, di sini perannya masyarakat juga harus meleak politik atau dibekali dengan pendidikan politik biar lebih paham jangan ikut terjerumus hal yang salah,” tuturnya.

Menurutnya, PBB akan memberikan tawaran kepada rakyat soal keadilan dan kepastian hukum. Hal itu sudah menjadi visi dan misi partainya.

“Menegakan keadilan dan memberikan kepastian hukum itu penting. Karena kepastian hukum itu tidak bisa diperjualbelikan. Apabila masyarakat sudah mendapatkan keadilan soal kepastian hukum itu, tentunya keamanan dan kenyamanan tercipta serta terwujudlah kesejahteraan sejati,” ucapnya.

Ketua DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sumsel, Muhammad Toha Oni, menjelaskan, semua orang memiliki identitas, hanya saja keliru kalau ada yang menghubungkan itu dengan politik.

Politik identitas dianggap bernilai negatif dan mengkotak-kotakan pandangan. Padahal identitas dalam berpolitik sangat penting, sehingga bisa menjadi tahu ke mana arah dan pandangan politik. Namun, PKS tidak memusingkan asal semuanya tidak melanggar aturan yang ada.

“Semua aspek kehidupan pasti memiliki unsur identitas. Menurut kami dalam berpolitik telah ada bingkainya, yaitu sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, dan NKRI,” jelasnya.

Dia menambahkan, visi partai PKS adalah menjadi partai pelopor dalam mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pembukaan UUD 1945. Lalu, misinya adalah menjadikan PKS sebagai sarana perwujudan masyarakat madani yang adil, sejahtera, dan bermartabat yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta’ala, dalam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Tujuan PKS adalah terpenuhinya hak, kewajiban, dan tanggung jawab politik setiap anggota sebagai warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” pungkasnya. •RDR



“Perlunya juga perlindungan dari tindakan kekerasan, karena kaum marjinal seperti waria dan PSK rentan mendapatkan kekerasan baik verbal dan nonverbal”

Leonardo Syahmin



KAUM MARJINAL JUGA PUNYA HAK SUARA

Kaum marjinal yang ada di tengah masyarakat selalu dibuat seperti orang-orang yang terpinggirkan hingga pembuat onar. Ruang gerak mereka seakan dibatasi, apalagi saat ingin menyalurkan bakat dan minatnya di berbagai kegiatan.

Harapan mereka akan calon pemimpin baru untuk Indonesia ke depan agar kehadiran mereka bisa diterima di masyarakat luas. Tidak ada lagi batas-batas pembeda antara kaum-kaum marjinal, yang hingga saat ini masih berjuang untuk diterima di masyarakat.

Koordinator Program Pencegahan dan Pengendalian HIV AIDS pada Kelompok Pekerja Seks Perempuan (PSP) Yayasan Intan Maharani Palembang, Leonardo Syahmin, mengatakan, ada banyak kekerasan para waria dan Pekerja Seks Komersial (PSK) di Kota Palembang untuk bisa mendapatkan kemudahan akses saat menjadi rakyat Indonesia.

Permasalahan yang biasanya dihadapi para waria dan PSK adalah tidak mempunyai Kartu Keluarga (KK) karena diusir dari keluarganya dan juga warga pendatang. Sehingga mereka kesulitan mendapatkan akses identitas, bantuan sosial, pelayanan kesehatan dan pendidikan yang layak, seperti masyarakat umum lainnya.

“Ketika ada bantuan dari pemerintah, tapi mewajibkan teman-teman dengan syarat administrasi. Lagi-lagi terkendala, sehingga mereka agak sulit tersentuh bantuan yang dibutuhkan. Perlunya juga perlindungan dari tindakan kekerasan, karena kaum marjinal seperti waria dan PSK rentan mendapatkan kekerasan baik verbal dan nonverbal,” ucapnya.

Untuk akses ekonomi, sebenarnya para waria dan PSK membutuhkan bantuan tak hanya sembako atau kucuran modal. Tapi pelatihan-pelatihan untuk mereka memulai berbisnis, sehingga ilmunya bisa diterapkan untuk mereka memulai usaha.

Stigma negatif juga membatasi gerak mereka untuk terlibat dalam berbagai kegiatan masyarakat, karena dirundung, disalahkan, disudutkan dan dipandang rendah.

Walau banyak Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Palembang yang terus memperjuangkan masalah Hak

Asasi Manusia (HAM) mereka, tapi sampai kapanpun mereka tidak akan diterima di masyarakat. Mereka pun memiliki harapan yang besar ke presiden terpilih di Pemilu 2024.

Alami Diskriminasi Sosial

Banyak PSK yang ingin lepas dari dunia hitam dan bekerja dengan penghasilan yang halal. Sulitnya mendapatkan pekerjaan dengan rekam jejak masa lalunya, membuat mereka berharap ada titik terang yang disediakan presiden kedelapan untuk mereka.

Sedangkan para waria hanya ingin presiden ke depan bisa membuat kebutuhan pokok murah, sehingga mereka tidak kesulitan untuk bertahan hidup. Mereka juga ingin berkembang dalam bisnisnya, terutama bisnis kecantikan.

Pelatihan dan pembinaan pun sangat dibutuhkan bagi mereka agar tidak lagi merasa menjadi kaum-kaum termarjinalkan lagi. Terlebih bisnis salon yang banyak dilakoni para waria kian sepi, dengan menjamurnya barbershop kekinian dan tutorial kecantikan di internet.

“Mereka sebenarnya ingin berbaur tanpa adanya pembeda dengan masyarakat lainnya. Mereka ingin adanya program-program untuk merangkul kebutuhan mereka,” katanya.

Komunitas musik underground, yang mencakup

penggiat punk, metal dan sejenisnya, turut merasakan adanya diskriminasi dari masyarakat luas akan keberadaannya. Menjadi kaum-kaum termarjinalkan, membuat gerak mereka semakin sempit karena pandangan miring dari masyarakat.

M Syahri Romadhon (42), penggiat musik keras berujar, hak-hak mereka sebagai WNI masih sangat sulit didapatkan. Dari presiden zaman dulu hingga kini, mereka selalu dipinggirkan.

Menurutnya, pemerintah selama ini tidak menganggap mereka ada, apalagi saat mereka menggelar berbagai event musik keras di tengah masyarakat.

Memakai baju serba hitam, tatoan, menggunakan piercing dan menikmati musik-musik keras, langsung diidentikkan sebagai aktivitas pesta narkoba dan orang-orang yang sering berbuat kriminal. Padahal mereka hanya ingin menyalurkan hobinya, daripada berbuat kriminal.

“Kami selalu dipandang negatif hanya karena tampilan dan musik kami. Padahal, banyak juga orang-orang yang mengonsumsi narkoba, berbuat kriminal bahkan korupsi, dengan tampilan yang rapi, berdasi dan menduduki jabatan penting di pemerintahan. Masyarakat juga masih memandang tampilan kami ini buruk, yang berpengaruh pada sulitnya te-

man-teman mendapatkan pekerjaan yang layak,” kata vokalis band metal Ketoprak ini.

Madon, sapaan akrabnya, yang sudah lama berkecimpung di komunitas musik keras, tidak pernah melihat pemerintah merangkul mereka, seperti penggiat seni lainnya. Padahal karya musik mereka, tidak kalah dengan seniman-seniman lainnya yang mendapatkan dukungan dari pemerintah.

Muhammad Toyib (40), pengamat musik Sumsel menambahkan, anak-anak yang bergelut di musik keras, banyak yang berpendidikan tinggi hingga bekerja di perusahaan besar di Indonesia, namun masih saja pandangan negatif selalu melekat di mereka.

“Secara sosial, mereka tidak terakomodir dengan baik. Padahal anak-anak punk, metal dan sejenisnya, hanya ingin menunjukkan pemberontakan dari sebuah sistem yang mereka anggap salah. Mereka juga berkontribusi menggerakkan perekonomian dari bawah,” ujarnya yang akrab disapa Pay.

Pay dan Madon berharap, dengan pemerintahan yang nantinya akan dipimpin kepala negara baru bisa bersinergi dengan musisi dari kalangan bawah. Jika ekonomi mereka berjalan lancar, kebutuhan hidup pasti akan terakomodir dan peluang untuk melakukan kriminal juga akan kecil.

Indra Apriansyah (42), calon anggota legislatif Partai Gerindra Dapil 5 Kabupaten Muara Enim, turut bersuara terkait nasib kaum termarjinalkan di Sumsel. Sebagai bagian dari peggiat musik keras, Indra mengakui masih banyak masyarakat yang memandang rendah kalangan anak punk dan metal dari tampilan luarnya saja.

“Kita tidak bisa memaksakan orang berpandangan seperti apa atau harus senang dengan keberadaan kita yang dianggap termarjinalkan. Tapi ada banyak hal positif yang sudah diperbuat dan itu akan menjadi bukti bahwa kaum termarjinalkan juga bisa berkarya dan tidak seperti pandangan miring orang,” ujarnya yang juga gitaris band black metal Malam Satu Suro.

Jika terpilih menjadi wakil rakyat di DPRD Muara Enim, dia ingin menjadi jembatan bagi kaum-kaum termarjinalkan untuk bisa mendapatkan hak yang sama dengan masyarakat luas. Mulai dari berkarya hingga mendapatkan pekerjaan yang layak untuk memenuhi kebutuhan hidup. Salah satunya dengan membentuk rumah kreatif yang bisa menampung semua hasil karya kaum marjinal di Sumsel, terutama di Kabupaten Muara Enim.

Dengan menyediakan wadah tersebut, kaum termarjinalkan akan bisa lebih menonjolkan industri kreatifnya dan membuktikan ke khalayak jika banyak hal-hal baik yang bisa dilakukan, tidak melulu dinilai dari tampilan luarnya saja.

●RDR





“Jadi kalau mau menang, maka perlu menarik suara dari NU”

Ardiyan Saptawan

INFO
DAPIL

Minggu III • September 2023

15

KADER DAERAH MENANGKAN PRABOWO

Partai Gerindra Sumatera Selatan mulai memanaskan mesin menghadapi Pemilu 2024 dengan menggelar konsolidasi secara besar-besaran, meski bertajuk pengukuhan Pengurus Anak Cabang DPC Gerindra Kota Palembang.

Ada perubahan konsep kampanye yang dilakukan Partai Gerindra di Pemilu 2024 agar target mereka tercapai. Bukan itu saja, para kader di daerah juga mendapat tugas tambahan dari Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, di Pilpres 2024.

Ribuan simpatisan yang hadir pada pengukuhan PAC Partai Gerindra Kota Palembang minggu lalu itu secara tidak langsung menunjukkan kekuatan mereka.

Ketua DPC Partai Gerindra Kota Palembang, Prima Salam, menyerukan kepada semua kader bahwa pada 2023 mereka mendapatkan tambahan mandat dan tugas dari DPP Gerindra. Dalam kurun sembilan bulan ke depan, mereka diminta memenangkan Prabowo Subianto sebagai presiden kedelapan.

“Kemudian Partai Gerindra harus menjadi pemenang di Pemilu 2024, bagaimana cara kita DPC Gerindra Kota Palembang mewujudkan itu semua dalam kurun waktu hanya sembilan bulan. Saat Surat Keputusan (SK) itu turun, sejak detik itu juga kami menjalankan setiap program-program kerja sesuai arahan dari DPP Gerindra,” tegas Prima Salam.

Pada Pemilu 2024, mereka yakin Partai Gerindra akan meraih kemenangan. Sehingga kegiatan yang dilakukan saat ini hanya sebuah pemanasan sebagai upaya menambah ilmu sekaligus memompa semangat para kader untuk lebih maksimal. Untuk itu, dia minta seluruh kader untuk tidak lagi bermain secara individual dan hanya menampilkan sosok pribadi, melainkan bergerak bersama-sama.

“Ada aura-aura kemenangan di 2024. Sehingga acara ini terselenggara berkat kerja sama dan kolaborasi antara DPC Gerindra dan 50 putra-putri terbaik yang kami hantarkan ke KPU untuk menjadi wakil-wakil di DPRD. Saat ini tidak ada lagi cara-cara yang sukses untuk mencapai suatu tujuan dengan cara individualistik, yang ada cara kolaborasi dan kebersamaan kita semua,” cetusnya.

Prima Salam juga mengingatkan jika ada capres pada hari ini, di antara semua calon, yang mendapatkan ujian paling berat adalah Prabowo Subianto.

Pada 2009, saat mencalonkan diri sebagai wakil presiden, namun belum ditakdirkan untuk menjadi wakil presiden. Kemudian di Pemilu 2014 kembali mencalonkan diri sebagai presiden namun kembali belum ditakdirkan.

Selanjutnya, pada 2019, mencalonkan diri lagi menjadi presiden namun belum juga berhasil. Sehingga pada 2024 menjadi kepesertaan Prabowo Subianto yang keempat kalinya. Pada 2024 inilah mereka yakin Prabowo Subianto akan menjadi presiden kedelapan.

“Untuk itu, kami siap menjalankan instruksi partai dan siap memenangkan Prabowo Subianto menuju RI satu dan siap memenangkan Partai Gerindra di Sumsel,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Gerindra Sumatera Selatan, Ahmad Wazir Noviadi, mengatakan, saat ini rangkaian proses Pemilu 2024 sudah keluar data dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada tahapan Daftar Calon Sementara (DCS).

Sedangkan Bappilu Partai Gerindra sedang menggodok dan menyusun saksi untuk ditempatkan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) di seluruh Sumatera Selatan, baik tingkat kabupaten hingga kecamatan.

“Sementara kita menunggu Daftar Calon Tetap rangkaian sudah kita mulai, bersama Dewan Pembina Partai Gerindra Bapak Mawardi Yahya, keliling pada putaran pertama ke sejumlah wilayah di Sumsel, hadir bersama kader Partai Gerindra untuk menghidupkan mesin partai dan memacu semangat para kader,” tegas AW Noviadi.

Untuk agenda terdekat, Bappilu Partai Gerindra sendiri saat ini masih mengumpulkan saksi.

“Saat ini, data-data saksi di Sumatera Selatan di angka 75

persen, karena demografi di Sumsel ini ada yang di gunung, ada yang di perairan, itu yang menjadi treatment khusus bagaimana nanti suara-suara kita yang di perairan yang jauh dari kota/kabupaten dapat terkumpul. Sehingga menjadi satu kesatuan secara penuh akan kita dapatkan datanya, kita akan memberikan pembekalan dan pelatihan terhadap saksi,” terangnya.

Sementara untuk lumbung suara Prabowo dan Partai Gerindra di Sumsel, mereka yakin menang karena selama ini selalu unggul. Target mereka di DPR RI pada 2024 ini yakni merebut kursi Ketua DPR serta meraih suara mayoritas di tingkat kabupaten/ kota.

“Di tingkat provinsi juga kami berharap dapat merebut kursi Ketua DPRD, dan target untuk RI yang tadinya hanya tiga kursi semoga pada Pemilu mendatang akan ditambah lagi menjadi empat kursi dari Sumatera Selatan,” tegasnya.

Di sisi lain, Noviadi juga mengungkapkan, mereka belum mengambil langkah atau keputusan politik apapun di Pilgub Sumsel 2024. Meski ada dorongan partai untuk mengusung Mawardi Yahya sebagai calon gubernur Sumsel periode mendatang, namun hal itu masih berupa usulan dari para kader.

“Di Partai Gerindra kami memiliki banyak stok orang-orang

yang hebat untuk kami dorong menjadi kepala daerah, tapi tentunya tugas yang pertama adalah memenangkan Pemilu dan memenangkan Pak Prabowo terlebih dulu,” ucapnya.

Sementara, siapa yang diusung Partai Gerindra di Pilgub Sumsel nanti mereka punya banyak kader yang bisa diandalkan, seperti Edi Santana Putra, Aswari, Mawardi Yahya, serta beberapa kader lainnya.

“Kami tidak kekurangan orang-orang hebat dan saya kira itu sudah disiapkan tentunya dan ketika menang pemilu dan Pak Prabowo menjadi presiden, siapapun yang terbaik nanti Insya Allah akan mewakili Partai Gerindra untuk di eksekutif nanti,” tuturnya.

Peluang Masih Merata

Meski secara umum Prabowo Subianto masih memimpin secara popularitas, namun belum ada jaminan apapun kalau Ketua Umum Partai Gerindra itu akan menjadi pemenang di Pilpres 2024. Hingga saat ini kekuatan para capres ini masih berimbang.

“Kalau kita melihat Prabowo dan Ganjar identitas politik hampir sama, yakni nasionalis. Sementara Anies lebih condong ke agamis. Nasionalis memang cukup besar namun kekuatannya terbagi dua. Sehingga faktor yang paling menentukan itu adalah siapa wakilnya,” ungkap pengamat politik dari Universitas Sriwijaya, Ardiyan Saptawan.

Dosen FISIP Unsri ini mengungkapkan, karakter pemilih yang sama antara Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo membuat suara keduanya bisa terpecah. Sehingga perlu faktor pendukung yakni wakil presiden.

Selain itu, keberadaan Nahdlatul Ulama (NU) juga menjadi faktor kemenangan.

Siapa yang bisa mendapatkan suara NU, maka dia menang.

“Jadi kalau mau menang, maka perlu menarik suara dari NU. Perlu diingat Ma'ruf Amin bukan orang partai tapi dia orang NU dan Jokowi berhasil mendulang suara di Pemilu 2019.

Jadi kuncinya ada di NU,” terangnya.

•RDR



“Komunikasi dengan parpol pendukung tetap diperlukan tapi juga tidak harus diposisikan. Tempatkan sesuai porsinya sehingga tujuan utama bisa berjalan dengan baik”

Elektison Somi



CALON PRESIDEN CUMA MODAL POPULARITAS

Bakal calon presiden yang hadir saat ini ternyata bukan menjadi figur panutan dari mahasiswa karena dinilai belum memiliki kriteria yang mereka inginkan.

Para pemimpin yang akan bertarung saat ini masih hanya mengandalkan popularitas dan elektabilitas, sementara kemampuan dalam mengurus rakyat belum teruji.

Secara umum, mahasiswa Indonesia tidak butuh sosok populer karena hal itu bukan jaminan mereka bisa mensejahterakan masyarakat Indonesia. Selain itu, meskipun mereka dianggap layak, namun bagi mahasiswa perlu tahapan lanjutan, terutama soal konsep yang ditawarkan untuk Indonesia ke depan.

Bila memang jelas dan masuk dalam pemikiran mahasiswa tentu mereka akan mendukung penuh. Sehingga pemimpin ke depan nantinya bukan hanya mengandalkan kepopuleran, melainkan mampu membawa negara lebih maju.

Presiden Mahasiswa dari Universitas Sriwijaya, Mohammad Azra D Dzaky, menyatakan, bakal calon presiden yang hadir baru terlihat hanya mementingkan popularitas dan elektabilitas. Para elit politik masih mementingkan bagaimana bisa menang di Pilpres maupun Pileg nanti. Sementara secara kualitas terdang sedikit abai.

“Kami dari mahasiswa di Sumatera Selatan mengharapkan bakal calon presiden yang jelas taktik dan program mereka ke depan. Kami tidak butuh calon presiden yang populis karena hal itu tidak menjamin bisa membawa

Indonesia maju,” tegasnya.

Dia mengatakan, rakyat Indonesia dikhawatirkan terjebak dengan sesuatu keadaan yang salah. Sosok yang ditampilkan sekarang hanya mengandalkan kepopuleran tanpa tahu apa program akan dibawa.

“Rakyat Indonesia jangan dibutakan dengan kondisi seperti ini. Mereka membaca di media sosial dan melihat bakal calon presiden atas dasar itu. Jangan salah memilih karena yang diutamakan rakyat itu harus melihat kejelasan program mereka untuk mengurus rakyat Indonesia kedepannya,” tuturnya.

Dari tiga bakal calon yang mengemuka saat ini, yakni Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan, Azra menjawab tegas ketiganya belum layak karena semua diunggulkan oleh faktor popularitas.

Bagi mahasiswa, nama tidak begitu penting namun mereka akan memilih siapa yang benar-benar mampu membawa kemajuan Indonesia dengan konsep para bakal calon presiden ini.

“Figur yang kami pilih itu adalah presiden yang mampu sejahterakan rakyatnya secara merata. Karena presiden yang mampu meratakan kesejahteraan rakyat itu impian kami. Selama ini kesejahteraan tidak merata. Ketiga calon itu belum cocok karena belum kita dengar siapa yang paling layak mampu mewujudkan harapan mahasiswa tadi,” tuturnya.

Pendapat yang sama disampaikan Presiden Mahasiswa Univer-

sitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah, Muhammad Yoga Prasetyo, yang menegaskan bakal calon pemimpin banyak terlihat menjual diri di media dan baliho-baliho. Hal itu lebih memicu kepada praktik politik identitas dengan mengedepankan popularitas dan elektabilitas.

“Kami kaum mahasiswa dan pemuda membutuhkan sosok pemimpin yang bisa diandalkan. Bukan hanya mengejar suara, menjual diri di media sosial, baliho hanya untuk mengejar suara dipilih karena populis,” tegasnya.

Menurutnya, para mahasiswa akan berkumpul untuk menghadiri adu taktik para calon presiden yang digelar oleh BEM Universitas Indonesia. Namun, secara pribadi Yoga menyebutkan ketiga calon itu layak namun harus ada pembuktian.

“Makanya kami semua mendukung program Bung Melki Sedek, Ketua BEM UI untuk menggelar debat calon presiden. Di sana kita akan melihat mereka adu taktik program yang layak, itulah pilihan mahasiswa nantinya,” ucapnya.

Terkait keputusan sosialisasi di kampus, Yoga berpendapat, mahasiswa Sumsel sepakat akan melakukan aksi seperti BEM UI dengan memberikan undangan kepada bakal calon pemimpin.

“Untuk pemilu kita di Sumsel akan melakukan itu juga. Kalau parpol ingin masuk ke kampus akan kami tolak. Kami yang akan memberikan mereka undangan untuk diberikan ruang untuk debat politik. Jadi tidak ada kampanye, kami akan menguji program-program mereka,” paparnya.

Ketua Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Seni dan Bu-

daya Universitas Muhammadiyah Palembang (UMP), Gali Waskito Ramadhan, menyebutkan suara kaum muda jangan hanya dimanfaatkan.

“Kalau saya berharap sebagai mahasiswa bakal calon presiden nanti memanfaatkan suara kami saja. Karena suara kaum muda banyak 40-45 persen, mereka membutuhkan itu. Tetapi setelah itu akan melupakan kaum muda,” jelasnya.

Dia berharap bakal calon presiden juga merangkul dan mementingkan kaum muda ke depannya. Karena kaum muda sebagai generasi bangsa membutuhkan presiden yang juga mampu merangkul mereka.

“Kami ingin presiden yang bisa membaca apa keinginan kaum muda. Terlebih lagi di era digitalisasi, presiden bisa ikut turun dan merespons itu semua. Tentunya presiden yang ideal itu memikirkan rakyat Indonesia dan kaum muda generasi Indonesia,” jelasnya.

Harus Mampu Berkomunikasi

Secara umum ketiga bakal calon presiden ini punya kelebihan dan kekurangannya. Namun semua kekurangan itu bisa diatasi dengan baik atau tidak tergantung komunikasi yang dijalankan antara presiden terpilih dengan DPR, sehingga terjalin sinergi politik.

“Sehingga baik atau tidaknya ketiga bakal calon presiden ini bisa dilihat bagaimana mereka membangun komunikasinya. Selain itu dia juga harus mampu menjembatani serta membangun sinergi politik karena kalau sudah menjadi presiden, dia harus membangun komunikasi dengan semua partai dan itu ada DPR,” terang pengamat hukum dan politik, Elektison Somi.

Penentu kedua yakni faktor pendukungnya. Selain komunikasi, presiden terpilih harus bisa memilih orang-orang yang tepat dalam mendukung program kerjanya di level menteri. Presiden yang menentukan arah kebijakan, sementara menteri yang melaksanakannya. Untuk menerjemahkan arah kebijakan itu perlu orang-orang yang tepat.

“Siapa orang yang tepat itu, kalangan profesional. Jangan terlalu banyak memasukkan orang-orang partai di eksekutif karena bukan porsinya mereka untuk mengerjakannya. Tempatkan orang-orang partai pada porsi yang sesuai, kan ada tempat yang selevel menteri tapi tidak mengganggu arah kebijakan,” jelas praktisi hukum ini.

Selama ini, kaum profesional banyak bermain di belakang layar sehingga sering terabaikan. Namun sudah saatnya kaum profesional ini maju agar arah kebijakan sesuai harapan.

“Komunikasi dengan parpol pendukung tetap diperlukan tapi juga tidak harus diposisikan. Tempatkan sesuai porsinya sehingga tujuan utama bisa berjalan dengan baik. Itu saja kuncinya,” ucapnya. ●RDR





“Di desa, masyarakatnya masih ber-
baur tingkat kerja samanya bagus,
toleransinya, sistem kekeluargaannya
dan lainnya. Tinggal bagaimana calon
anggota dewan ini melakukan pen-
dekatan kepada Masyarakat”

Serlika Aprita

INFO
PILEG

Minggu III • September 2023

17

SUARA KEKERABATAN LEBIH MENJANJIKAN

Ada banyak cara yang dilakukan para calon anggota legislatif dalam mendulang suara agar berhasil duduk di parlemen. Namun, banyak pula di antara mereka akhirnya gagal meski telah mengeluarkan modal yang besar karena suara yang didapat tidak sesuai target.

Permainan suara mulai dari politik uang hingga melakukan kecurangan di beberapa tahapan pemilu juga menjadi salah satu penyebab kegagalan tersebut, meski secara elektabilitas dan kapabilitas mereka memenuhi syarat.

Dari banyak pilihan suara yang ada, faktor kekerabatan menjadi pendulang yang paling efektif dan menjamin. Sayangnya, suara tradisional ini juga sering terkontaminasi oleh politik uang yang dilakukan para kandidat lawan.

Meski demikian, peluang untuk mendulang suara tradisional ini masih terbuka luas, khususnya di perdesaan dan sebagian kecil perkotaan.

Secara umum, suara pemilih terbagi tiga, yakni suara tradisional, rasional, dan swing voters atau mengambang. Suara tradisional cenderung mengandalkan kekerabatan, keluarga serta kedekatan emosional.

Pengamat politik dan hukum, Serlika Aprita, mengatakan, suara tradisional ini lebih banyak ada di perdesaan. Sehingga caleg yang berasal dari desa biasanya akan maksimal untuk mendulang suara karena banyak keluarga besar mereka.

“Di desa, masyarakatnya masih berbaur tingkat kerja samanya bagus, toleransinya, sistem kekeluargaannya dan lainnya. Tinggal bagaimana calon anggota dewan ini melakukan pendekatannya kepada masyarakat,” kata dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang (UMP) ini.

Ia menjelaskan, di area perdesaan masyarakatnya cenderung mudah dipengaruhi. Baik dan buruknya perilaku seseorang juga akan banyak mendukung pencalonan mereka.

“Tinggal kitanya, apakah bisa merangkul, melakukan sosialisasi, penyuluhan dan hal lainnya yang bisa menarik hati masyarakat,

seperti apabila terpilih akan melakukan perbaikan di perdesaan, hidup warga lebih baik dan hal lainnya,” jelasnya.

Sehingga apabila yang ikut mencalonkan diri sebagai caleg merupakan putra di daerah tersebut, maka ia akan lebih mudah lagi mempengaruhi masyarakat untuk memilihnya.

“Putra daerah, misalnya mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI warga di daerahnya akan ikut memilih dia karena tadi sistem kekeluargaan yang begitu erat di perdesaan,” ungkapnya.

Apalagi jika terpilih putra daerah ini akan ikut mengembangkan desa di mana tempat dia dilahirkan. “Maka akan timbul kebanggaan masyarakat apabila ada putra daerahnya yang terpilih. Tentunya pendekatan kepada warga juga harus diutamakan” jelasnya.

Kemudian terkait money politic pada Pemilu 2024, Serlika mengatakan masyarakat sekarang lebih cerdas. Apalagi zaman modern ini, masyarakat bisa mengakses informasi sendiri melalui media sosial tentang siapa calon atau kandidat yang benar-benar memperjuangkan hak maupun aspirasi rakyat ke depan.

“Misalkan calon A maupun B menggunakan jurus money politic. Saya yakin masyarakat mengutamakan figur terlebih

dahulu, mereka bisa mencari tahu apakah calon ini punya masa lalu seperti kasus korupsi dan lainnya. Masyarakat sekarang sudah lebih pintar,” ungkapnya.

Serlika juga meyakini kalau politik uang sebetulnya sudah tidak berpengaruh besar lagi karena dilakukan secara instan, sehingga tidak ada kekerabatan yang melekat di dalamnya.

“Mungkin uang diterima, tapi masyarakat kita sudah lebih pintar, bijak, dan cerdas, ditambah lagi di era digital yang lebih canggih, mereka tahu siapa yang benar-benar memperjuangkan hak rakyat maupun aspirasi,” bebernya.

Pada Pemilu 2024, Serlika berharap perlu diperhatikan semua aspek baik dampak bagi pemilih, partai politik, penyelenggara pemilu dan sistem pemerintahannya, sehingga bentuk kekurangan pada Pemilu 2019 bisa diperbaiki.

“Contoh berkaitan dengan persiapan logistik. Kemudian perlu adanya sosialisasi terhadap pemilih pemula bagaimana cara mencoblos dan lainnya. Diharapkan pihak pemerintah ke depan benar-benar serius dalam menyelenggarakan Pemilu 2024,” harapnya.

Masih Punya Potensi

Sementara caleg Partai Golkar, Yustin Kurniawan Sondi, mengaku, di Pemilu 2024 ini dia lebih mengutamakan suara kekerabatan. Berdasarkan hasil pengalamannya di Pemilu 2019, suara tradisional inilah yang ternyata banyak mendulang suara.

Yustin mengatakan, di Pemilu 2019, sebagai pendatang baru, dia banyak melakukan berbagai cara, mulai dari membentuk tim sukses, mengumpulkan rekan sejawat, dan melakukan sosialisasi ke seluruh wilayah daerah pemilihan.

Banyaknya kegiatan yang dilakukan membuat biaya operasional yang dikeluarkan juga sangat besar. Namun, hasilnya tidak sesuai yang diharapkan.

“Pengalaman lima tahun lalu tentu menjadi pengalaman berharga bagi saya untuk Pemilu 2024 ini. Tentunya strategi yang saya lakukan berbeda dan akan lebih mengutamakan suara teman, kerabat, keluarga, tetangga dan orang-orang dekat lainnya. Selain efektif juga Insya Allah lebih menjamin,” terang caleg DPRD Kota Palembang dari Dapil 1 ini.

Diakui Yustin, politik uang memang sulit dipisahkan atau dihilangkan dari politik demokrasi Indonesia. Namun cara instan itu juga tidak menjamin seseorang untuk menjadi seorang anggota dewan tanpa melakukan pendekatan yang baik ke masyarakat. Sehingga, dia yakin suara tradisional dan suara rasional di Pemilu 2024 masih punya potensi tinggi.

“Sekarang tinggal bagaimana perilaku kita di masyarakat, kalau kita baik dengan tetangga dan lingkungan, Insya Allah mereka juga akan mendukung,” ucapnya.

Kekuatan suara tradisional ini memang masih terlihat nyata di wilayah perdesaan dan sebagian kecil perkotaan.

Tokoh masyarakat Desa Sugihwaras Barat, Kecamatan Rambang, Kabupaten Muara Enim, Arbi, mengatakan, sistem kekeluargaan di desanya cukup erat. Bahkan, di desa mereka saat ini ada dua orang yang bakal maju pada Pileg 2024 untuk DPRD Kabupaten Muara Enim, yakni Dono Ciputra dari Partai PKB dan Alohan Sitompul dari Partai Hanura.

Dikatakan Arbi, selama ini warga desa lebih memilih orang yang mereka kenal dekat seperti masih ada hubungan keluarga. Sementara di desa hampir semuanya punya hubungan kerabat, tinggal memilih mana yang paling dekat.

Di Kecamatan Rambang ini sendiri ada dua desa yang berseberangan, yakni Desa Sugihwaras Barat dan Desa Sugihwaras dengan total jumlah mata pilih mencapai 3.500 suara lebih.

“Sehingga bila ada calon di kedua desa ini, masyarakat yang memilih pasti mengutamakan sistem keluarga dekatnya dulu,” ungkap Kepala Dusun IV tersebut.

Bagi warga desa sendiri, kata Arbi, siapapun yang terpilih nanti dari kampung mereka setidaknya bisa membawa dan mengangkat tempat tinggal menjadi lebih baik, terutama soal infrastruktur.

“Kemudian semoga selalu mendengarkan aspirasi rakyat, tentunya amanah dan perjuangkan desa di Kecamatan Rambang ini,” pungkasnya. ●RDR



“Kalau anggarannya sudah masuk dalam pagu KPU dan Bawaslu untuk 2024, kepastian anggaran tidak akan menjadi persoalan”

Mohamad Muraz



PILPRES DIPAKSAKAN SATU PUTARAN

Komisi II DPR menyetujui pagu anggaran Pemilu 2024 untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebesar Rp27,39 triliun dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebesar Rp11,6 triliun.

Pagu anggaran tersebut tercatat hanya untuk pelaksanaan pemilu hingga pelaksanaan pemilihan presiden putaran pertama. Kebutuhan anggaran pilpres putaran kedua untuk KPU dan Bawaslu yang nilainya hampir Rp20 triliun belum mendapat kepastian dari pemerintah.

Dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR dengan KPU dan Bawaslu, Selasa, 12 September 2023, disetujui pagu anggaran untuk Pemilu 2024. Pagu anggaran yang disetujui sesuai dengan Surat Edaran Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Suharto Monoarfa, serta Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, tertanggal 31 Juli 2023.

Adapun pagu anggaran KPU pada 2024 disetujui sebesar Rp28,36 triliun dari usulan Rp44,73 triliun. Namun, anggaran sebesar Rp974 miliar digunakan untuk Pilkada 2024 di empat daerah otonom baru, sehingga pagu anggaran untuk Pemilu 2024 hanya sebesar Rp27,39 triliun. Masih ada kekurangan sebesar 17,34 triliun yang dalam usulannya akan digunakan untuk tahapan pemilihan presiden dan wakil presiden putaran kedua.

Adapun pagu anggaran Bawaslu pada 2024 disetujui sebesar Rp11,60 triliun juga hanya sampai dengan pilpres putaran pertama. Adapun simulasi kebutuhan anggaran Bawaslu untuk pilpres putaran kedua sebesar Rp4,65 triliun belum masuk dalam pagu anggaran 2024.

Wakil Ketua Komisi II DPR, Saan Mustopa, menjelaskan, untuk saat ini memang baru disetujui anggaran untuk satu putaran. Jika Pilpres 2024 berjalan dua putaran, anggaran baru akan disetujui nanti.

“Nah, hanya yang dianggarkan sekarang itu untuk 14 Februari, nanti begitu faktualnya terjadi putaran kedua, otomatis anggaran putaran kedua akan cair,” kata Saan, Rabu, 13 September 2023.

Saan menyebut anggaran pilpres putaran kedua tersebut belum bisa disetujui dan dicairkan lantaran sifatnya belum pasti. Namun dia memastikan pemerintah sudah menyiapkan sejumlah dana itu.

“Jadi karena putaran kedua kan belum faktual, kita kan belum tahu. Kalau misalkan sesuatu yang belum ada, terus kita cairkan anggarannya bagaimana?” kata dia.

Saan membantah anggapan bahwa Pilpres 2024 hanya di-setting untuk satu putaran atau hanya diikuti oleh dua pasang calon.

“Bukan, tidak ada rencana itu. Bahwa itu

dari awal memang sudah direncanakan untuk dua putaran,” ujar Saan.

Ketua KPU, Hasyim Asy’ari, mengatakan, KPU melaksanakan perencanaan anggaran hingga pelaksanaan pilpres putaran kedua. Sebab, dalam pemilu yang demokratis, pihaknya tidak bisa memprediksi jumlah kontestan, termasuk hasil pilpres, akan berlangsung dalam satu atau dua putaran. Oleh karena itu, pengusulan anggaran dibuat berdasarkan kebutuhan hingga pilpres dua putaran.

Meskipun tidak masuk dalam pagu anggaran 2024, Kemenkeu telah berkomitmen untuk memberikan anggaran seandainya nantinya akan terjadi pilpres putaran kedua. “Bahwa nanti alokasinya sudah dijanjikan oleh pemerintah kalau memang terjadi pilpres putaran kedua, sudah disiapkan dari besaran yang sudah diajukan oleh KPU,” katanya.

Berdasarkan Pasal 6A Undang-Undang Dasar 1945, pasangan capres-cawapres yang memenangi kontestasi harus meraih lebih dari 50 persen suara dengan mendapat setidaknya 20 persen suara di setiap provinsi dan lebih dari setengah total provinsi yang ada. Jika tidak ada pasangan capres-cawapres yang memperoleh suara sesuai jumlah tersebut, dilaksanakan pilpres putaran kedua. Pilpres putaran kedua diikuti oleh pasangan capres-cawapres yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua.

Dalam Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilu 2024, tahapan pilpres putaran kedua dimulai dengan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih pada 22 Maret hingga 25 April 2024. Dilanjutkan tahapan kampanye (2-22 Juni), masa tenang (23-25 Juni), pemungutan suara (26 Juni), penghitungan suara (26-27 Juni), rekapitulasi hasil penghitungan suara (27 Juni-20 Juli), hingga pengucapan sumpah/janji presiden dan wapres (20 Oktober).

Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan, idealnya anggaran pelaksanaan pilpres putaran kedua dicairkan paling lambat akhir Februari atau setelah pemungutan suara 14 Februari. Pagu anggaran yang diberikan pun semestinya tidak dikurangi dari usulan karena bisa berdampak pada op-

timalisasi pelaksanaan tahapan.

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Mohamad Muraz, menilai, pemerintah seharusnya memberikan kepastian anggaran kepada penyelenggara pemilu. Oleh karena itu, anggaran pilpres putaran kedua mestinya sudah ditetapkan dalam pagu anggaran 2024. Jika anggaran tidak terpakai karena pilpres hanya satu putaran, anggaran pun tidak akan terpakai.

“Kalau anggarannya sudah masuk dalam pagu KPU dan Bawaslu untuk 2024, kepastian anggaran tidak akan menjadi persoalan,” ujarnya.

Secara terpisah, Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Djohermansyah Djohan, mengatakan, kebutuhan anggaran menjadi konsekuensi dari pelaksanaan demokrasi elektoral. Oleh karena itu, pemerintah harus berani mengalokasikan anggaran agar pelaksanaan pemilu tidak terganggu.

“KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu harus dibuat senyaman mungkin, seaman mungkin, tidak disibukkan dengan persoalan ketersediaan anggaran karena pemerintah harus menjamin semua keperluan penyelenggaraan pemilu,” ujarnya.

Menurut Djohermansyah, tidak masuknya anggaran pilpres putaran kedua dalam pagu 2024 menunjukkan komitmen pemerintah dalam melaksanakan pemilu cenderung rendah. Sebab, KPU dan Bawaslu sudah merencanakan dan mengusulkan kebutuhan anggaran hingga tuntasnya pemilu, termasuk jika terjadi pilpres dua putaran.

Ia menilai, komitmen lisan dari pemerintah untuk menjamin anggaran sangat lemah. Sebab, selisih

waktu pemungutan suara hingga masuknya tahapan pilpres putaran kedua sangat pendek, hanya berselang satu bulan. Pada masa-masa tersebut, KPU dan Bawaslu disibukkan dengan rekapitulasi suara dan gugatan dari peserta pemilu, sehingga energi mereka terkuras.

Lebih jauh, apabila pemerintah tidak memiliki anggaran, seharusnya bisa diambil dari dana cadangan. Namun, besaran pagu anggaran tetap harus sudah diberikan sejak awal, sehingga ada jaminan terselenggaranya pilpres hingga dua putaran. “Kalau pemerintah hanya memberikan anggaran untuk satu putaran, memangnya pemerintah bisa menjamin bahwa pemenang pilpres sudah bisa ditentukan hanya dalam satu putaran?” tanya Djohermansyah.

Sekretaris Jenderal Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Kaka Suminta, menilai, pemberian pagu anggaran hanya untuk pilpres satu putaran bisa menggiring opini pemilih agar menyelesaikan pilpres hanya dalam satu putaran. Padahal, pemilih juga mesti terinformasi bahwa pilpres bisa terjadi dua putaran. Salah satunya dengan memberikan anggaran pelaksanaan pilpres hingga putaran kedua.

Di sisi lain, masalah politik bisa muncul jika pasangan capres-cawapres yang lolos di putaran kedua berbeda pandangan politik dengan presiden.

Anggaran pilpres putaran kedua bisa berdampak apabila presiden memiliki sentimen dengan kedua pasangan calon yang berkontestasi di putaran kedua.

“Pemilu itu tahapannya pasti, sehingga anggarannya harus sudah jelas, tetapi hasilnya tidak bisa diprediksi,” ujar Kaka. ●RDO



“Peran Polwan sangat besar, sama dengan personel laki-laki. Kehadirannya di tengah masyarakat, di tempat pemungutan suara (TPS)”

Irjen Dedi Prasetyo

POLWAN HARUS JADI PENDINGIN PEMILU

Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan, Polri telah melaksanakan cooling system atau sistem pendinginan terkait dengan pengamanan Pemilu Serentak 2024.

Dia menekankan, dibutuhkan peran dari jajaran Polisi Wanita (Polwan) dalam kegiatan tersebut guna menciptakan situasi yang aman dan damai dalam pesta demokrasi lima tahunan itu.

“Kegiatan cooling system sudah dibentuk dan saya kira di sinilah nanti peran dari rekan-rekan Polwan dengan karakter rekan-rekan yang memiliki kekhususan ini akan sangat cocok. Dan tentunya ini bisa mendorong upaya cooling system kita bisa berjalan dengan lebih baik,” ujar Sigit dalam acara syukuran HUT ke-75 Polwan di Gedung Bareskrim Polri, Rabu, 13 September 2023.

Dengan adanya peran Polwan sebagai cooling system dalam pemilu, Sigit menyatakan dapat menghindari adanya perpecahan di tatanan masyarakat. Karena dengan terus mempertahankan persatuan dan kesatuan, maka dapat mewujudkan visi menuju Indonesia Emas 2045. Namun sebaliknya, bila terjadi hal yang mengganggu kamtibmas, maka akan sulit mewujudkan visi tersebut.

“Namun kalau kemudian ada perpecahan besar, maka akan berdampak pada kemunduran dan ini juga tentunya tidak hanya pendek. Namun, kemudian akan menjadi panjang karena berbagai permasalahan baru muncul, bonus demografi yang kita harapkan untuk bisa kita manfaatkan,” tuturnya.

“Sehingga ini betul-betul bisa mendorong Indonesia keluar dari middle income trap, harapannya seperti itu. Namun ini juga bisa menjadi bencana demografi kalau kita tidak siap,” sambungnya.

Adapun, tema yang diangkat adalah ‘Polri Presisi untuk Negeri, Polwan Siap Mendukung Pemilu Damai Menuju Indonesia Maju’. Menurutnya, tema ini sangat tepat dan menjadi tantangan saat ini untuk bersama-sama seluruh kekuatan yang dimiliki, bagaimana mewujudkan dan menyongsong pemilu damai yang tentunya menjadi harapan bagi

seluruh masyarakat.

“Karena kita tahu bahwa saat ini kita berada di kondisi yang betul-betul harus kita jaga, apakah kita akan jalan di tempat atau kita akan take off, melompat menuju masa depan bangsa yang lebih baik,” kata Sigit.

Sigit menjelaskan, dari pengalaman pemilu yang ada, perbedaan pendapat, pandangan, hingga pilihan itu adalah hal yang pasti terjadi. Namun, yang paling penting dari semua itu adalah seluruh personel kepolisian harus mampu menjaga serta mempertahankan persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia.

Di sisi lain, Sigit menegaskan, Polwan juga harus mengambil peran besar dalam rangka terus meningkatkan serta mempertahankan kepercayaan publik terhadap institusi Polri. Sigit menjelaskan, dengan mempertahankan tingkat kepercayaan publik yang tinggi terhadap Polri, maka hal itu dapat menjawab segala bentuk tantangan yang akan dihadapi setiap personel kepolisian.

“Sehingga mau tidak mau, kita harus terus meningkatkan, baik secara organisasi maupun p e n - g a k u a n publik terhadap personal rekan-rekan, ini menjadi penting,” ucap Sigit.

Sigit men-

takan, Polwan menjadi kekuatan tersendiri dalam menghadapi segala tantangan yang terjadi di masyarakat. Bahkan, senyum Polwan dapat menyelesaikan situasi sebelum permasalahan itu terjadi.

“Namun demikian, kalau kita bisa selesaikan di awal dengan senyumnya Polwan, semua masalah bisa selesai, alhamdulillah. Dan saya kira dengan tampilnya rekan-rekan Polwan di depan juga dengan dibekali keahlian khusus, maka akan lebih baik untuk menghadapi hal-hal tersebut,” tutur Sigit.

Sigit juga mengapresiasi seluruh Polwan yang terus mengukir prestasi untuk mengharumkan nama bangsa dan Polri, baik di dalam maupun luar negeri. Tak hanya itu, Sigit mengingatkan kepada seluruh Polwan untuk terus meningkatkan kemampuan maupun keahlian agar memiliki keunggulan-keunggulan.

Dengan begitu, Sigit memastikan, Polri saat ini sangat menjunjung tinggi kesetaraan gender. Atau dengan kata lain, Polwan di institusi Polri saat ini diberikan kesempatan maupun ruang untuk menempati posisi-posisi strategis.

“Jadilah putri-putri pilihan menuju ke arah tercapainya cita-cita luhur, terciptanya masyarakat Tata Tentrem Kerta Raharja kepada negara dan bangsa, dengan semboyan esthi bhakti warapsari. Itu yang bisa saya sampaikan, terus semangat, terus tunjukkan bahwa Polwan semakin hari akan semakin hebat dan akan mewarnai organisasi Polri ini dengan

munculnya Polwan-polwan baru di jabatan-jabatan high risk maupun jabatan-jabatan strategis,” terangnya.

Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia, Irjen Dedi Prasetyo, mengatakan peran Polwan sangat penting dalam mengawal pemilu damai.

“Peran Polwan sangat besar, sama dengan personel laki-laki. Kehadirannya di tengah masyarakat, di tempat pemungutan suara (TPS),” jelas Dedi, 29 Agustus 2023.

Dedi Prasetyo mengungkapkan, profesionalitas Polwan yang ditunjukkan dalam menjaga TPS dan mengawal proses pemilu dari tingkat Bhabinkamtibmas sangat diapresiasi pada Pemilu 2019.

Polwan telah bekerja keras tanpa lelah dan rasa takut saat berhadapan dengan persoalan dan dinamika di lapangan ketika penyelenggaraan pemilu.

Berkaitan dengan itu, Polri pun telah melakukan Langkah-langkah persiapan untuk mengawal Pemilu 2024. Termasuk meningkatkan kompetensi Polwan melalui kolaborasi dengan berbagai pihak eksternal, seperti kerja sama langsung dengan lembaga penyelenggara pemilu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Pemahaman bersama mengenai pelaksanaan dan seluruh rangkaian dalam pemilu sangat penting sebagai pijakan untuk menjalankan koordinasi di lapangan.

Langkah kolaboratif tersebut sebetulnya telah dilakukan sekitar pertengahan Juli 2022, satu bulan setelah tahapan pemilu dimulai. Saat itu, Bawaslu menjalin kerja sama dengan Polri untuk menghadapi penyelenggaraan Pemilu 2024.

Pertemuan kedua lembaga itu menyepakati untuk membangun kerja sama dalam penegakan hukum pemilu melalui penguatan sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu) penanganan pidana pemilu. Bawaslu dan Polri juga bekerja sama untuk penanggulangan cepat kejahatan siber.

Adanya kerja kolaboratif tersebut diharapkan dapat menguatkan upaya untuk mencegah munculnya faktor kendala maupun juga proses penanganan persoalan yang lebih efektif. Peran Polri sangat signifikan untuk memastikan keamanan, bahkan hingga penanganan jika ditemukan pelanggaran pidana pemilu.

Dalam hal ini, keberadaan Polwan yang sejauh ini eksis dengan tugas-tugas humanis, baik dalam penanganan kasus maupun kemampuan untuk dekat dengan masyarakat sangat diperlukan. •RDO



"Saya justru menganggap bahwa apa yang dilakukan Pak Zul itu merupakan bagian dari kepedulian beliau kepada masyarakat yang membutuhkan"

Eddy Suparno



ZULHAS BAGI-BAGI DUIT PATUT DICONTOH KETUM PARTAI LAIN

Video Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan, membagikan uang tengah ramai dibahas di media sosial. Video Zulhas yang tengah membagikan uang berpecahan Rp50 ribu kepada sejumlah masyarakat dan nelayan tersebut diunggah oleh akun TikTok resmi PAN yakni @amanat_nasional. Video berdurasi 24 detik tersebut diunggah pada 10 Juli 2023.

Selain video bagi-bagi uang, baru-baru ini Menteri Perdagangan ini juga memborong barang dagangan para penjual di Pasar Palapa Pekanbaru, Riau, untuk kemudian dibagikan kepada ibu-ibu yang ada di pasar.

Ia mengatakan kegiatan tersebut merupakan sedekah biasa yang memang rutin dilakukan. Juga sebagai bentuk dukungan kepada para pedagang di pasar maupun pelaku UMKM.

"Ini saya beli ayam ya, bukan bagi-bagi duit. Ini saya beli, nanti dibagikan ke orang-orang gratis," ujar Zulhas saat mengunjungi salah satu penjual di Pasar Palapa, Jumat, 15 September 2023.

Lebih lanjut, Zulhas juga mengatakan kalau kegiatan tersebut murni untuk membantu para pedagang dan tidak terkait dengan kegiatan kampanye apapun, mengingat pada Pemilu 2024 dirinya tak maju sebagai calon presiden maupun calon anggota legislatif.

"Kita ini caleg bukan, capres bukan, masa sedekah nggak boleh?" ucap Zulhas.

Ia menambahkan, kegiatan tersebut merupakan bagian dari sedekah seperti yang amanahkan oleh sang ibu. Hal ini dia lakukan di berbagai kesempatan, bahkan sampai saat ke luar negeri.

"Ibu saya dulu bilang 'Nak kamu kalau makan, jangan makan sendiri saja, lihat sekitarmu, jangan sampai ada yang kelaparan. Kamu kalau lebih, berbagi, sedekah'. Itu pesan ibu saya," urainya.

"Jadi saya memang ini kebiasaan di mana-mana (sedekah), sama kayak waktu di India juga. Masa kita lihat orang tergeletak, kita biarin. Manusia itu diciptakan paling mulia, jadi jangan dibeda-bedakan. Kalau saya sedekah, ada yang nggak terima, nggak apa-apa," ujarnya.

Apa yang dilakukan Zulhas itu kemudian

ramai disebut sebagai politik uang. Meski demikian, PAN mengatakan hal yang dilakukan bukan bentuk politik uang.

Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladi, mengatakan niat Zulhas sebenarnya hanya bersedekah. Ia mengatakan hal tersebut kerap dilakukan Zulhas saat kunjungan.

"Sudah menjadi kebiasaan dari Bang Zulkifli Hasan untuk membagi uang dengan niat melakukan sedekah," kata Viva.

Ia juga menyatakan kegiatan yang terekam dalam potongan video tersebut tak dapat dikategorikan sebagai politik uang. Hal ini karena tak ada narasi yang menjurus ke kegiatan kampanye PAN.

"Hal itu tidak ada kaitannya dengan kampanye PAN. Tidak ada narasi untuk memilih atau mencoblos PAN," ujarnya.

Hal senada juga disampaikan Sekretaris Jenderal PAN, Eddy Soeparno. Dia menjelaskan tentang viralnya video Zulkifli Hasan sedang membagi-bagikan uang besaran Rp50 ribu.

"Lihat videonya, itu adalah sebuah perbuatan kepedulian terhadap masyarakat, terutama masyarakat ekonomi lemah, bukan dalam konteks money politics. Tuduhan itu jelas salah sasaran," kata Eddy.

Eddy menyebut, Zulhas tidak memiliki motif politik uang dalam membagikan uang gocapan

dikait-kaitkan.

Ia kembali meminta untuk melihat video tersebut tanpa prasangka. Dalam video tersebut, lanjut Eddy, tidak ada ajakan apapun. "Lihat videonya secara jernih dan tanpa prasangka."

"Sama sekali tidak ada apapun di sana saya lihat umbul-umbul, kemudian atribut partai atau apa yang ingin menunjukkan bahwa ini adalah acara partai yang mana partai kemudian membagi-bagikan uang, jadi tidak ada di situ. Bahkan tidak ada ajakan apapun," tegasnya.

Menurutnya, hal yang dilakukan Zulhas hampir sama seperti orang lain membagikan sedekah kepada masyarakat yang membutuhkan.

"Saya justru menganggap bahwa apa yang dilakukan Pak Zul itu merupakan bagian dari kepedulian beliau kepada masyarakat yang membutuhkan. Coba lihat kegiatan-kegiatan lapangan Pak Zul di seluruh Indonesia di mana beliau kalau bertemu masyarakat yang butuh spontan memberikan uang. Ini sama sekali bukan money politics," tegasnya.

Sementara itu, Komisi Pemberantasan

Korupsi (KPK) menegaskan, perbuatan Zulhas membagikan duit ke masyarakat merupakan politik uang.

"Ya kita sebut dengan politik uang itu. Sebetulnya jauh dari pelaksanaan (Pemilu), kalau pas hari H atau minus satunya itu yang kita sebut dengan serangan fajar, kan biasanya seperti itu, ya," ujar Deputy Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Wawan Wardiana, Kamis, 14 September 2023.

Wawan memastikan, meski jauh dari pelaksanaan Pemilu, namun tindakan Zulhas merupakan bagian dari politik uang. Apalagi, Zulhas merupakan ketua umum sebuah partai politik yang akan mengikuti Pemilu 2024.

Wawan menduga ada konflik kepentingan dari perbuatan Menteri Perdagangan itu.

"Kalau kita, misalkan saya yang tidak punya kepentingan apa-apa kemudian datang ke kaum dhuafa atau fakir miskin, mungkin enggak masalah. Tapi, sebagai publik figur, apalagi di belakangnya itu membawa gerbong seperti itu, tentunya kan beda. Pasti lah ada sesuatu," kata Wawan.

Terkait bantahan dari PAN soal bagi-bagi gocapan merupakan sedekah, Wawan tetap berpandangan hal itu merupakan politik uang. "Ya kalau dari pihak kami ya, itu perilaku yang menuju ke sana (politik uang), walaupun belum masuk ke kampanye," ucap Wawan.

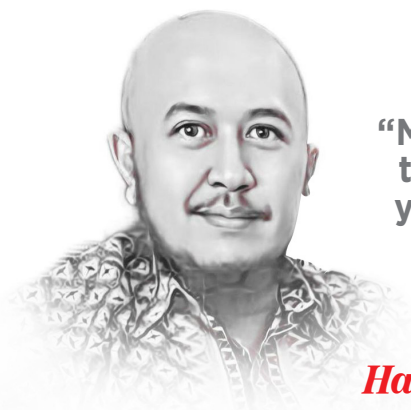
Atas dasar itu, Wawan berharap masyarakat tidak mudah terbuai dengan perilaku seperti yang dilakukan Zulhas, meski belum masuk masa kampanye.

"Tapi, harapannya dari sekarang masyarakat cobalah diingatkan hal-hal seperti itu jangan terjadi lah," kata Wawan.

Wawan juga menyinggung perkataan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang membolehkan masyarakat menerima uang serangan fajar. Menurut Wawan, perkataan Menteri Pertahanan itu tidak dibenarkan.

"Sekali lagi, kami juga mengimbau kepada pemimpin-pemimpin partai khususnya, kemudian juga jangan juga membolehkan 'ambil saja uangnya'. Justru dengan cara seperti itu, makanya masyarakat 'oh boleh ya kalau begitu'. Padahal kan di UU Pemilu enggak boleh seperti itu," pungkas Wawan. ●RDR





“Memasuki tahun politik tentunya banyak partai yang mencoba menarik simpati dalam tragedi Rempang”

Hari Purwanto

CARI SIMPATI LEWAT KONFLIK REMPANG

Partai Ummat tengah mencari simpati masyarakat untuk bisa mendulang banyak suara dan lolos ke Senayan. Beragam cara dilakukan partai yang diinisiasi Amien Rais ini untuk mencari dukungan, termasuk ikut bersuara pada konflik lahan di Pulau Rempang, Kepulauan Riau.

Ketua Umum Partai Ummat, Ridho Rahmadi pada saat memberikan pembekalan terhadap calon anggota legislatif (caleg) menyinggung mengenai konflik lahan di Pulau Rempang.

“Apakah negara ini milik rakyat atau milik PT Makmur Elok Graha?” tanya Ridho. Para caleg serentak menjawab “rakyat”.

Dia juga mempertanyakan kepada para caleg apakah penyerobotan lahan di Pulau Rempang bentuk kezaliman.

“Apakah pengusiran warga Rempang termasuk zalim, tidak?” tanya Ridho Rahmadi dengan suara lantang. “Zalim” sambut para peserta.

Adanya kezaliman tersebut, kata Ridho, Partai Ummat berencana akan mengirim Tim Kantor Bantuan Hukum bagi warga di Pulau Rempang.

Dia berharap Tim Kantor Bantuan Hukum dari Partai Ummat bisa memberikan kemudahan bagi warga di Pulau Rempang dalam mencari keadilan.

“Kita akan lawan kezaliman ini, kita akan kerahkan Tim Kabah (Kantor Bantuan Hukum) Partai Ummat untuk membela rakyat Rempang,” jelas Ridho.

Menurutnya, seluruh kader Partai Ummat akan membantu warga Pulau Rempang yang saat ini sedang mengalami kesulitan. Maka dari itu, Partai Ummat mendesak pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk membatalkan seluruh rencana pembangunan Eco City dan pabrik kaca asal China.

“Partai Ummat mendesak pemerintah untuk membatalkan rencana pembangunan Rempang Eco City dan pabrik kaca Xinyi Grup dari China,” tutur Ridho.

Dia juga meminta kepada pemerintahan Presiden Jokowi untuk tidak melakukan penyerobotan lahan milih warga asli Pulau Rempang. “Dan meminta agar pemerintah mengembalikan kehidupan masyarakat Melayu di Rempang seperti semula,” ujar Ridho.

Selain itu, menantu Amien Rais itu juga meminta kepada pihak kepolisian untuk membebaskan seluruh warga Pulau Rempang yang ditangkap pada saat aksi

demonstrasi beberapa hari lalu.

“Membebaskan delapan tersangka yang ditahan karena demonstrasi penolakan yang lalu” tegas Ridho.

Sebagai bentuk keseriusan Partai Ummat dalam mengawal kasus ini, maka DPP Partai Ummat akan segera mengirim tim investigasi untuk mendapatkan fakta-fakta bagi tim advokasi hukum yang akan berkoordinasi kepada pihak terkait untuk melakukan pembelaan secara hukum.

Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto, menilai, Partai Ummat sedang mencari simpati dari warga Pulau Rempang dengan menerjunkan tim investigasi.

Padahal, saat ini pemerintah sedang berupaya menyelesaikan konflik tersebut dengan cara persuasif dan musyawarah. Hal tersebut dilakukan agar konflik yang terjadi tidak berkepanjangan. Pemerintah dan warga Pulau Rempang sedang mencari jalan tengah untuk persoalan pembebasan lahan tersebut.

“Memasuki tahun politik tentunya banyak partai yang mencoba menarik simpati dalam tragedi Rempang,” kata Hari.

Dia menuturkan, Partai Ummat ingin mengambil kesempatan dalam kesempatan. “Bahkan partai yang baru muncul mencoba mencari dukungan lewat tragedi Rempang,” jelas Hari.

Dia pun mengingatkan kepada seluruh warga Pulau Rempang agar tetap waspada. Jangan sampai konflik yang terjadi saat ini ditanggapi oleh kepentingan politik praktis.

“Pesan saya untuk warga Rempang jangan sampai tragedi Rempang dipolitisasi oleh kelompok kepentingan yang hanya ingin mendulang suara Pemilu 2024,” ujar Hari.

Hari menerangkan, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, menyebutkan tanah yang bersengketa itu merupakan milik negara. Rencananya, pemerintah akan membangun Eco City itu

akan berdiri di kawasan hutan. Sebanyak 600 hektare di antaranya merupakan HPL dari BP Batam.

Maka dari itu, kata Hari, rencana Partai Ummat untuk mengirimkan Tim Kantor Bantuan Hukum untuk warga Rempang hanya akan memperkeruh suasana.

“Rencana Partai Ummat untuk mengirimkan tim kantor bantuan hukum bagi warga Pulau Rempang jangan memperkeruh situasi, karena sudah menjadi rahasia umum perilaku Amien Rais selama ini. Kritik tanpa membangun dan memiliki kecenderungan provokatif,” ucap Hari.

Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi, menilai, langkah yang dilakukan Partai Ummat dengan mengirimkan Tim Kantor Bantuan Hukum ke Pulau Rempang merupakan bentuk kepedulian

antara sesama anak bangsa.

“Bukan

berupaya untuk mencari simpati dan meraih dukungan. Tapi, yang dilakukan oleh Partai Ummat adalah bentuk kepedulian terhadap anak-anak bangsa yang terzalimi dan terampas hak-haknya, di mana di situ tumpah darah berada,” terang Muslim Arbi.

Dia menilai, warga Pulau Rempang hanya berjuang untuk keadilan mereka. Sebab, menurutnya, pemerintah hanya memikirkan kepentingan dari para investor.

“Pulau Rempang telah menyedot perhatian publik di mana investor lebih di bela oleh penguasa,” jelas Muslim Arbi.

Menurutnya, rezim lebih pro terhadap investor dibanding rakyat. Apalagi, pemerintah tidak memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada saat ini.

“Maka, kemunculan Partai Ummat yang berencana mengirimkan Tim Kantor Bantuan Hukum bagi warga Pulau Rempang sudah sangat tepat. Dan apa yang dilakukan itu adalah amanat Partai Ummat,” jelas Muslim Arbi.

Dia menambahkan, seharusnya partai politik yang lainnya mengikuti jejak Partai Ummat untuk membantu warga Pulau Rempang. Sebab, sebagai warga negara memiliki kewajiban untuk membela sesama. Apalagi yang saat ini tertindas.

“Jadi apa yang dilakukan itu tepat dan seharusnya bukan hanya Partai Ummat. Tapi bagi semua yang peduli bangsa harus tampil lakukan pembelaan dari segi hukum atas hak-hak tanah warga di Pulau Rempang,” tandas Muslim Arbi.

•RDO



“Jadi, mungkin dalam bahasa ini (deklarasi AMIN), PKS mempunyai pertimbangan dan perhitungan dari segi nilai, dari segi orientasi, kesamaan visi, sama perhitungan dan kalkulasinya”

Dadang Rahmat Hidayat



PKS HANYA MANFAATKAN ELEKTORAL AMIN

Keraguan-raguan tak lagi dinampakkan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) jelang pendaftaran bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden untuk pemilihan presiden (Pilpres) 2024, yang akan berlangsung pada 10 November 2023.

Pasalnya, Majelis Syura PKS mantap menetapkan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai bakal capres-cawapres yang didukung pada pesta demokrasi tahun depan, yang disampaikan di Kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Jumat malam, 15 September 2023.

Dalam konferensi pers, Presiden PKS Ahmad Syaikhul menyampaikan hasil Musyawarah Majelis Syura, yang tegas menyatakan Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin sebagai bakal cawapres yang mendampingi Anies Baswedan pada Pilpres 2024.

“Memutuskan Bapak Abdul Muhaimin Iskandar sebagai Bakal Calon Wakil Presiden Republik Indonesia mendampingi Bapak Anies Rasyid Baswedan pada Pemilihan Presiden 2024,” ucap Syaikhul.

Hasil Musyawarah Majelis Syura kali ini memperkuat hasil musyawarah sebelumnya yang telah menetapkan Anies Baswedan sebagai capres pada Pilpres 2024. Syaikhul lantas mengatakan, Musyawarah Majelis Syura IX menjadi landasan PKS secara resmi mengusung Anies-Cak Imin.

“Menyetujui dan menetapkan pasangan Bapak Anies Rasyid Baswedan dan Bapak Abdul Muhaimin Iskandar (AMIN) sebagai pasangan Bakal Calon Presiden dan Bakal Calon Wakil Presiden Republik Indonesia yang secara resmi diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera pada Pilpres 2024,” ucapnya.

Syaikhul mengatakan, Musyawarah Majelis Syura IX PKS dihadiri 99 anggota dari perwakilan 38 provinsi se Indonesia, dan dihadiri Anies Baswedan dan Cak Imin, serta jajaran elite DPP seperti Sekre-

taris Jenderal (Sekjen) Habib Aboe Bakar Alhabsyi dan Bendahara Umum Mahfudz Abdurrahman.

Dalam deklarasi tersebut, Syaikhul menyematkan peci nasional kepada pasangan bakal capres-cawapres Anies-Muhaimin yang resmi diusung partai berlogo bulan sabit yang dipimpinnya tersebut.

Bahkan, Anies dalam pidatonya menyampaikan rasa syukurnya atas babak baru yang dimasuki oleh Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), karena secara resmi PKS mendeklarasikan pasangan bakal capres-cawapres yang diusung adalah dirinya dan Cak Imin.

Menurutnya, proses politik itu adalah dalam rangka mewujudkan misi yang besar dan mulia, untuk membuat Indonesia menjadi

sebuah negeri yang menghadirkan rasa keadilan, memberikan rasa kesetaraan, dan pemerintahan yang memberikan perlindungan kepada setiap tumpah darah Indonesia.

“Misi yang kita bawa adalah membuat Indonesia menjadi sebuah negeri yang menghadirkan rasa keadilan, sebuah negeri yang memberikan rasa kesetaraan, dan pemerintahan yang memberikan perlindungan kepada setiap tumpah darah Indonesia,” ucap Anies.

“Alhamdulillah Partai Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera, bersama dengan Partai Kebangkitan Bangsa bergabung menjadi sebuah koalisi, Koalisi Perubahan. Yang koalisi ini Insya Allah akan mengemban misi yang tadi saya sampaikan,” jelas Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 tersebut.

Kendati begitu, pakar komunikasi politik Unpad, Dadang Rahmat Hidayat, memandang semua partai punya pertimbangan dan pertimbangan yang menyangkut aspek ideologis, aspek kesamaan visi dan misi, serta aspek kesamaan perjuangan. Sehingga, sikap PKS mendukung AMIN tidak terlepas dari hal itu.

“Ini berkaitan dengan elektabilitas, peluang atau pengaruh. Jadi semua akan melihat itu. Jadi, mungkin dalam bahasa ini (deklarasi AMIN), PKS mempunyai pertimbangan dan perhitungan dari segi nilai, dari segi orientasi, kesamaan visi, sama perhitungan dan kalkulasinya.

Jadi menurut saya itu yang

membuat PKS bergabung mendukung Anies-Cak Imin,” ujarnya.

Dia memandang, dominasi partai Islam dalam koalisi pendukung dan pengusung AMIN di Pilpres 2024 dipastikan tidak akan mengganggu pencalonan Anies Baswedan sebagai presiden dan Cak Imin sebagai wakil presiden. Mengingat, antara PKS dan PKB merupakan partai Islam, namun memiliki latar belakang atau garis ideologi ke-Islaman yang berbeda.

“Justru menurut saya tidak menjadi kesulitan dengan bergabungnya dua partai yang biasanya tidak bersama-sama (dalam satu koalisi). Mungkin ini faktor Anies lah yang mem-bounding keduanya. Tetapi juga tidak boleh dilupakan, politik kan esensinya kepentingan,” tegasnya.

Dari situ, dirinya memandang kepentingan politik antara PKS dan PKB bisa sama di satu sisi, dan juga bisa lain pada sisi yang berbeda. Sehingga, ada hal-hal yang patut didalami soal orientasi PKS mendukung AMIN.

Apalagi, dari sisi elektoral PKB empati urutan kelima perolehan kursi dan suara sah terbanyak pada Pemilu 2019, karena mendapat 13.570.970 suara atau 9,69 persen, yang berarti mendapat jatah 58 kursi atau 10,09 persen dari total 575 kursi.

Sementara, perolehan suara dan kursi PKS pada Pemilu 2019 berada dua tingkat di bawah PKB, atau menempati urutan ketujuh perolehan kursi dan suara sah terbanyak. PKS hanya mendapat 11.493.663 suara atau 8,21 persen, yang berarti mendapat jatah 50 kursi atau 8,70 persen dari total 575 kursi.

Maka dari itu, Dadang tak memungkiri maksud PKS mendukung AMIN adalah untuk memperoleh berkah elektoral atau efek ekor jas (coat-tail effect), selain karena faktor kesamaan dalam ideologi, nilai-nilai perjuangan, hingga visi dan misi ke depan untuk Indonesia.

“Jadi salah satunya konsistensi terhadap Anies. Walaupun mungkin ada faktor-faktor lain ya, mungkin perjuangan partainya (untuk meraup suara) lebih dekat ke Anies. Banyak partai yang begitu juga. Ada partai-partai kecil atau baru yang dia punya usungan presiden orientasinya salah satunya adalah punya pengaruh dari satu sosok sebagai presiden atau pasangan capres dan cawapresnya,” tuturnya.

Sehingga, Dadang tidak bisa memungkiri PKS punya hasrat politik yang tinggi mengusung AMIN, yang jika diibartakan seperti “Parasit” karena hanya ingin mendapatkan berkah elektoral dari pencalonan presiden dan wakil presiden di Pemilu 2024.

“Di sini (PKS) bukan mengalahkan, tapi mendapat keuntungan tertentu ya. Jadi di sini kalkulasinya tidak hitam putih. Banyak hal yang bisa dilakukan untuk di satu sisi tidak mendapat keuntungan tapi di sisi lain mendapatkan keuntungan. Pasti ada perhitungan,” tutup Dadang. ●RDO





“Jadi Airlangga harus rasional, kalau enggak diambil sama Prabowo, lebih baik dukung RK sama Ganjar agar Golkar tetap dapat porsi di pemerintahan yang akan datang”

Melchias Markus Mekeng

AIRLANGGA HARUS RASIONAL USULKAN RK CAWAPRES GANJAR

Partai Golkar beberapa pekan lalu telah resmi menyatakan dukungan terhadap bakal calon presiden Koalisi Indonesia Maju (KIM), Prabowo Subianto, dalam Pilpres 2024.

Adapun arah dukungan terhadap Prabowo itu dikumandangkan Partai Golkar sejak awal menyatakan bergabung dengan KIM bersama rekan sejawatnya yakni Partai Amanat Nasional (PAN).

Namun, di tengah perjalanan jelang Pilpres 2024, muncul kicauan dari sejumlah kader yang meminta Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, bersikap rasional dalam menentukan dukungan terhadap bakal capres yang muncul ke permukaan.

Berdasarkan hasil penelitian berbagai lembaga survei menyebutkan bahwa terdapat dua kandidat capres yang saat ini cukup potensial didukung Partai Golkar. Kedua kandidat itu yakni Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo.

Adapun posisi Partai Golkar saat ini yang berada di gerbong KIM dinilai bakal terancam lantaran sosok Airlangga sulit untuk dipilih menjadi pendamping Prabowo Subianto.

Di satu sisi, tawaran pindah haluan ke gerbong PDIP dengan memposisikan eks Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sebagai pendamping Ganjar bisa terwujud jika Airlangga bersikap rasional dalam menentukan arah di Pilpres 2024.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Melchias Markus Mekeng, mengungkapkan, apabila peluang Partai Golkar kecil mendapatkan kesempatan mendampingi Prabowo di Pilpres 2024, sebaiknya Airlangga segera mengambil sikap mencari opsi lain.

Mekeng mengatakan, sebagai nak-hoda partai, Airlangga juga harus rasional dalam membaca situasi politik, khususnya menentukan posisi ke mana arah Partai Golkar berlabuh dalam

Pemilu 2024.

Menurut Mekeng, pengambilan keputusan soal arah dukungan itu harus segera dilakukan agar Partai Golkar ke depannya mendapatkan porsi yang cukup strategis di dalam pemerintahan yang akan datang.

“Jadi Airlangga harus rasional kalau enggak diambil sama Prabowo, lebih baik dukung RK sama Ganjar agar Golkar tetap dapat porsi di pemerintahan yang akan datang,” ungkap Mekeng, Jumat, 15 September 2023.

Mekeng menjelaskan, ketidakjelasan status cawapres di KIM seharusnya dapat menjadi catatan khusus untuk dikonsolidasikan lebih lanjut di dalam internal partai. Sebab, Partai Golkar pada Pemilu 2019 juga pernah mendukung Prabowo Subianto dan mengalami kekalahan.

“Jadi maksudnya itu kalau enggak dikasih porsi cawapres, masa iya Golkar jadi pendukung Prabowo melulu dari 2014 udah dukung, kalah terus sekarang suruh dukung lagi,” ungkap Mekeng.

Di sisi lain, Mekeng menilai, sosok Ridwan Kamil yang disebut-sebut potensial untuk dampingi Ganjar di Pilpres 2024 seharusnya juga mendapatkan atensi khusus dari Airlangga agar dapat menetapkan strategi jelang Pemilu 2024.

Sebab, mengalihkan dukungan terhadap RK mendampingi Ganjar di Pilpres 2024 jauh lebih realistis daripada memendingkan keputusan pribadi Airlangga untuk mendukung Prabowo dengan harapan dapat menjadi cawapresnya.

“Jadi Airlangga pun harus realistis kalau dia enggak diterima oleh Gerindra. Oleh koalisinya ya harus berpikir realistis untuk partai bukan untuk dia pribadi,” terang Mekeng.

“Kalau ada kader potensial yang bisa didukung ya mendingan dukung kader potensial jadi cawapres dong. Jadi enggak kosong-kosong, Golkar ini kan mesin besar, harus realistis,” sambung Mekeng.

Mekeng menyebut, Airlangga dan Ridwan Kamil kecil kemungkinan mendapat tempat menjadi cawapres di KIM mendampingi Prabowo Subianto. Hal itu lantaran pada koalisi KIM kedua sosok itu memiliki saingan ketat yaitu Erick Thohir dan Gibran Rakabuming.

“Kalau saya pribadi enggak terlalu besar peluangnya. Karena irisan basis massanya juga sama aja, buat apa enggak menambah,” ucap Mekeng.

Sebaliknya, apabila nantinya Partai Golkar menentukan sikap beralih ke PDIP mengusung Ganjar jadi presiden dengan posisi RK sebagai cawapres, maka akan lebih menguntungkan.

“Iya, kalau menurut saya lebih menguntungkan lah, saling menguntungkan (Golkar ke PDIP, RK dampingi Ganjar),” jelas Mekeng.

Mekeng mengungkapkan, potensi Ridwan Kamil bakal dipilih PDIP menjadi pendamping Ganjar cukup besar lantaran sebelumnya Megawati Soekarnoputri telah melirik sosok lulusan arstiek tersebut.

Mekeng menuturkan, keyakinannya itu muncul lantaran RK sebelumnya telah dipanggil Megawati untuk mengadiri suatu acara. Ia menegaskan, dalam konteks ini, RK yang pernah dipanggil Megawati tersebut

telah menggambarkan bahwa masuk dalam porsi kandidat cawapres Ganjar.

Posisi RK yang berhasil mendapat basis suara konstituen cukup banyak di Jawa Barat menjadi nilai plus bagi PDIP untuk menjodohkannya dengan Ganjar Pranowo.

“Ya dia kan sudah pernah dipanggil sama Bu Mega. Bu Mega itu kalau memanggil orang itu tidak sembarangan, itu satu. Kedua, dia kan mantan Gubernur Jawa Barat, artinya dia mempunyai dapil yang jelas, Pak Ganjar kan punya dapil Jawa Tengah, Ridwan Kamil punya dapil Jawa Barat,” jelas Mekeng.

Menurut Mekeng apabila nanti posisi Airlangga atau Ridwan Kamil tidak terpilih menjadi cawapres mendampingi Prabowo Subianto pada Pilpres 2024, maka sebaiknya Partai Golkar henggang dari KIM.

“Makanya saya tadi bilang. Kalau Airlangga tidak didukung jadi cawapres ya ngapain juga kita di situ. Pasti di internal Golkar di bawah pun akan lihat kader Golkar lain yang punya potensi, itu mah rasional aja,” ungkap Mekeng.

Kendati demikian, Mekeng menilai, apabila nanti keputusan Airlangga tetap membulat bergabung dengan Prabowo, namun RK diambil oleh PDIP, maka kemungkinan mantan Wali Kota Bandung itu akan maju sebagai sosok profesional.

Mekeng mengungkapkan, jika dirunut melalui mekanisme sistem internal Partai Golkar, maka baik Ridwan Kamil ataupun Airlangga Hartarto sama-sama memiliki hak untuk mendampingi siapapun menjadi cawapres di Pemilu 2024.

Mekeng menambahkan, walaupun secara organisasi, Munas telah mengamankan Airlangga maju menjadi bakal capres atau cawapres, namun potensi RK maju mendampingi Ganjar di Pilpres 2024 cukup besar.

“(Soal Munas) Itu mah soal gampang lah, yang penting jadi cawapres dulu. Asal jangan utak-utik Rampimnas, Munas lah enggak jelas itu. Yang penting jadi cawapres dulu. Kita kan politik praktis, bukan teori.

Kalau teori kan semua harus ikut aturan, harus ini dulu, ya ketinggalan kereta,”

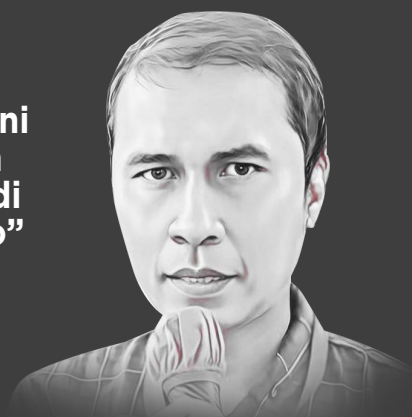
t a n d a s
Mekeng.

• RDO



“Posisi Erick Thohir saat ini memang menguntungkan sebab ia diperhitungkan di kubu Ganjar dan Prabowo”

Efriza



ERICK THOHIR PASTI BAWA KEMENANGAN

Menteri BUMN, Erick Thohir, semakin unggul dibandingkan kandidat populer lainnya dalam bursa calon wakil presiden. Elektabilitasnya terus di posisi teratas dalam beberapa simulasi lembaga survei.

Berdasarkan hasil survei terbaru dari Polling Institute, Erick Thohir unggul dalam dua simulasi pemilihan cawapres.

Pada simulasi 19 nama semi terbuka wakil presiden, Erick Thohir bersaing ketat dengan mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Erick Thohir memperoleh dukungan sebesar 15,1 persen. Sedangkan Ridwan Kamil mendapatkan perolehan sebesar 14,2 persen.

Sementara itu, di posisi ketiga ada Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dengan perolehan 9,8 persen. Posisi keempat, Mahfud MD memperoleh 8,8 persen. Selanjutnya di posisi kelima, Wali Kota Surakarta, Gibran Rakabuming Raka sebesar 8,6 persen. Posisi keenam, Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPP PPP, Sandiaga Uno, memperoleh 8,6 persen.

Kemudian Khofifah Indar Parawansa, Gatot Nurmantyo, Susi Pujiastuti, Puan Maharani, Andika Perkasa, Airlangga Hartarto, Sri Mulyani Indrawati, Yenny Wahid, Muhaimin Iskandar, Zulkifli Hasan, Tito Karnavian, Moeldoko, dan Salim Segaf Al-Jufri perolehannya di bawah 5 persen.

Sementara itu, dalam simulasi lima nama cawapres yang paling dipilih, Erick Thohir masih teratas dibuntuti Ridwan

Kamil. Erick memperoleh dukungan sebesar 25,5 persen dan Ridwan Kamil sebesar 21,1 persen. Selanjutnya, Sandiaga Uno menempati urutan ketiga dengan perolehan sebesar 19,9 persen. AHY meraih 12,5 persen dan Khofifah Indar Parawansa sebesar 5,5 persen.

“Pada simulasi 5 nama pilihan wakil presiden, Erick Thohir 24,5 persen, Ridwan Kamil 21,1 persen, dan Sandiaga Uno 19,9 persen lebih banyak dipilih, baru kemudian AHY 12,5 persen dan Khofifah 5,5 persen. Sementara belum menjawab 16,6 persen,” terang Peneliti Polling Institute, Kennedy Muslim, dalam keterangannya, Kamis, 14 September 2023.

Dalam survei ini juga membuat simulasi calon wakil presiden (cawapres) bagi masing-masing calon presiden yang saat ini mengemuka di ruang publik.

S i m u l a s i
cawapres
untuk

bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan, Anies Baswedan yang menempati urutan pertama yakni AHY. AHY dianggap paling pantas untuk mendampingi Anies Baswedan di Pilpres 2024. Dalam simulasi ini, AHY mendapat dukungan menjadi cawapres Anies Baswedan sebesar 32,4 persen.

Selain itu, muncul beberapa nama yang dianggap pantas mendampingi Anies Baswedan, di antaranya Khofifah Indar Parawansa dan Yenny Wahid. Khofifah mendapat dukungan sebesar 17,1 persen dan Yenny Wahid sebesar 13,8 persen.

“Di antara tiga nama dan kemungkinan nama lainnya, AHY paling banyak dipilih sebagai wakil presiden untuk mendampingi Anies. Alasannya, paling banyak karena dinilai lebih cocok dipasangkan dengan Anies,” jelas Kennedy.

Sementara itu, dalam survei ini juga terungkap calon wakil presiden yang pantas untuk mendampingi bacapres dari PDIP, Ganjar Pranowo. Pada simulasi tiga cawapres Ganjar Pranowo, Ridwan Kamil menempati posisi teratas dengan perolehan sebesar 31,7 persen. Sedangkan, Sandiaga Uno sebesar 27,1 persen dan Andika Perkasa sebesar 9,2 persen.

Kenedy menjelaskan, Ridwan Kamil dianggap paling pantas untuk mendampingi Ganjar Pranowo karena dinilai kinerjanya selama menjabat Gubernur Jawa Barat sangat baik. Sehingga, dukungan masyarakat terhadap Ridwan Kamil sangat besar.

“Di antara tiga nama dan kemungkinan nama lainnya, Ridwan Kamil paling banyak dipilih sebagai wakil untuk mendampingi Ganjar, alasannya paling banyak karena kerjanya dinilai bagus,” ujar Kennedy.

Selanjutnya pada simulasi 5 nama cawapres pendamping bacapres dari Koalisi Indonesia Maju (KIM), Prabowo

Subianto, Erick Thohir menempati urutan teratas dengan perolehan 28,8 persen. Disusul Gibran Rakabuming Raka sebesar 17,3 persen, Muhaimin Iskandar 8,8 persen, Khofifah Indar Parawansa sebesar 8,5 persen, dan Airlangga Hartarto sebesar 4,2 persen.

Dia menerangkan, keterpilihan Erick Thohir yang sangat besar ini dikarenakan kinerja cukup baik dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo.

“Di antara lima nama dan kemungkinan nama lainnya, Erick Thohir paling banyak dipilih sebagai wakil untuk mendampingi Prabowo. Alasannya, paling banyak dipilih karena kerjanya dinilai bagus,” terang Kennedy.

Survei ini dilakukan pada 21-25 Agustus 2023. Populasi survei ini merupakan warga negara Indonesia (WNI) yang berusia 17 tahun atau sudah menikah dan memiliki telepon seluler (sekitar 83 persen dari total populasi nasional).

Sementara itu, analisis politik dari Citra Institute, Efriza, menilai, Erick Thohir menjadi satu-satunya kandidat yang diperebutkan sebagai cawapres. Bargaining Erick Thohir juga kini cukup kuat karena masuk bursa cawapres Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo.

“Posisi Erick Thohir saat ini memang menguntungkan sebab ia diperhitungkan di kubu Ganjar dan Prabowo,” kata Efriza kepada Info Indonesia, Kamis, 14 September 2023.

Kendati demikian, peluang Erick Thohir lebih besar untuk menjadi cawapres pendamping Prabowo Subianto. Pasalnya, sejak awal PAN mempersiapkan Erick Thohir untuk Prabowo Subianto.

“Hanya saja peluang Erick Thohir lebih kuat di KIM, sebab PAN mendorong Erick Thohir untuk jadi cawapres Prabowo,” jelas Efriza.

Dia mengatakan, Erick Thohir sangat cocok untuk Prabowo Subianto karena kelengkapan dirinya. Erick Thohir memiliki rekam karir yang patut diperhitungkan. Karirnya pemerintahan pun cukup cemerlang.

Selain itu, Erick Thohir cukup aktif di media sosial. Hal itu, kata Efriza, menjadi sangat positif bagi Erick Thohir karena dianggap dekat dengan masyarakat.

Tidak hanya itu, Efriza menerangkan, Erick Thohir sebagai salah satu anggota Banser pastinya akan mendapatkan dukungan dari warga Nahdliyin.

“Modal secara sosial dan politik ia memang kuat, memperoleh dukungan kuat dari Nahdliyin, kalangan anak muda, ia juga diperhitungkan oleh PBNU,” terang Efriza.

Dia mengatakan, Erick Thohir sudah memiliki basis massa yang cukup kuat di Jawa Timur. Apalagi, sudah dianggap sebagai bagian dari keluarga NU.

“Ia (Erick Thohir) merupakan representasi dari kalangan NU,” ujar Efriza.

Di sisi lain, kata Efriza, Erick Thohir juga memiliki kekuatan logistik yang cukup di antara kandidat cawapres lainnya. “Dalam hal logistik ia tentu saja punya kekuatan modal itu,” tandas Efriza. **•RDO**

